PENGARUH KETIDAKMERATAAN PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH TERHADAP KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN 34 PROVINSI DI INDONESIA PERIODE TAHUN 2019-2021

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Oleh

HELMA

3219034

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
U I N SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
2023

LEMBAR PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayangMu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta, atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat di selesaikan. Shalawat dan salam selalu dilimpahkan kehadiratnya Rasullah Muhammad SAW.

Ibunda dan Ayahanda Tercinta

Sebagai bukti, hormat dan terima kasih yang tak terhingga, karya kecil ini saya persembahkan untuk ***Ibu Marni****,* ***Ayah Muhiddin*** *(kandung) dan* ***Ayah Ermen*** *(tiri) yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, restu dan kasih sayang tanpa batas dan tidak mungkin terbalaskan dengan selembar kertas dengan kata "persembahan" tertulis di atasnya. Semoga ini langkah awal untuk membahagiakan ibu dan ayah. Karena ku menyadari bahwa sampai sekarang ku belum bisa berbuat lebih lagi. Untuk ibu dan ayah yang selalu membuatku termotivasi dan selalu mengisiku dengan cinta. Selalu berdoa untukku, selalu menasihatiku dan selalu meridoiku untuk melakukan hal-hal yang lebih baik.Terima kasih ibu.....terima kasih ayah*

Saudari

Sebagai tanda terimakasih aku dedikasikan karya kecil ini untuk saudariku ***Fadilah Mutiara Sari S.Pd, Putria Ningsih, Helmi****. Terima kasih telah mendorong dan menginspirasi ku untuk menulis karya ini. ku berharap doa dan semua hal yang telah engkau berikan kepada ku akan membuat ku menjadi manusia yang lebih baik juga. Terima kasih banyak.*

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Ibuk Rini Elvira, SE., M.Si*, pembimbing skripsi saya, terima kasih telah membantu saya selama ini, telah menasihati saya, telah mengajari saya dan telah membimbing saya untuk menyelesaikan skripsi ini.*

By: Helma

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pengaruh Ketidakmerataan Pembangunan Antar Daerah Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan 34 Provinsi Di Indonesia Periode Tahun 2019-2021". Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada program studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SMDD Bukittinggi. Maka tak lupa pula untuk menyampaikan shalawat dan salam dari penulis kepada Nabi Muhammad SAW yang memimpin umatnya dari zaman jahiliah menuju zaman ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Penyusunan karya ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Prof. Dr. Ridha Ahida, M.Hum Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Hesi Eka Puteri, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Rika Widianita, SEI., M.E selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam yang telah memberikan fasilitas kepada penulis untuk menuntut ilmu.
4. Rini Elvira, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing dan Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyelesaian karya ini dan meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk membimbing dan nasehati penulis dalam perkuliahan. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan keberkahan untuk ibu.
5. Dosen dan Staff UIN SMDD Bukittinggi terkhusus yang berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang juga memberikan pengetahuan baik didalam kelas perkuliahan atau pun diluar. Serta masukan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

6. Staff Perpustakaan UIN SMDD Bukittinggi yang telah menyediakan fasilitas peminjaman buku yang penulis butuhkan dalam perkuliahan dan penulisan skripsi ini
7. Teruntuk BPS yang telah memfasilitasi data yang terkait dengan penelitian ini.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan karya ini dan yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu.

ABSTRAK

Skripsi ini disusun oleh **Helma NIM 3219034** Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang berjudul "**Pengaruh Ketidakmerataan Pembangunan Antar Daerah Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan 34 Provinsi Di Indonesia Periode Tahun 2019-2021**"

Penelitian ini berdasarkan pergerakan ketidakmerataan pembangunan antar daerah yang sebahagian besar tidak diikuti oleh ketimpangan distribusi pendapatan dimana fenomena ini tidak sejalan dengan teori yang menjelaskan bahwa ketidakmerataan pembangunan antar daerah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan. Penelitian bertujuan untuk membuktikan pengaruh variabel X (ketidakmerataan pembangunan antar daerah) terhadap variabel Y (ketimpangan distribusi pendapatan). Jenis penelitian menggunakan kausal komparatif dengan pendekatan kuantitatif, jenis data menggunakan data sekunder dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan, teknik analisis data menggunakan uji prasyarat data dan uji hipotesis, pengujian hipotesis dilakukan analisis regresi linear sederhana, Uji t, koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan variabel X berpengaruh pada alpha 5% atau confidence interval 95% terhadap variabel Y, artinya H0 ditolak dan Ha diterima dimana secara parsial variabel variabel X berpengaruh positif terhadap variabel Y. Hasil uji R Square variabel variabel X berpengaruh terhadap variabel Y sebesar 0,049 atau 4,9% sedangkan sisanya 95,1% dipengaruhi oleh variabel diluar penelitian seperti Inflasi, pertumbuhan penduduk, investasi yang lebih banyak di proyek yang padat modal, mobilitas sosial yang rendah, kebijakan industri substitusi impor, memburuknya nilai tukar, dan hancur nya industri kerajinan rakyat. Pengaruh ini tergolong rendah namun pemerintah perlu mengatasi tingginya ketidakmerataan pembangunan antar daerah sehingga ketimpangan distribusi pendapatan dapat berkurang melalui kebijakan.

.

Kata kunci: Ketidakmerataan pembangunan antar daerah, ketimpangan distribusi pendapatan, distribusi pendapatan.

ABSTRACT

This thesis was prepared by ***Helma NIM 3219034*** *Islamic Economics Study Program, Faculty of Economics and Islamic Business, State Islamic University (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi entitled "****The Effect of Interregional Development Inequality on Income Distribution Inequality of 34 Provinces in Indonesia for the 2019-2021 Period****".*

This research is based on the movement of uneven development between regions which is largely not followed by income distribution inequality where this phenomenon is not in line with the theory which explains that uneven development between regions is one of the factors that affect income distribution inequality. The study aims to prove the effect of variable X (uneven inter-regional development) on variable Y (income distribution inequality). This type of research uses comparative causal with a quantitative approach, the type of data uses secondary data with literature study data collection techniques, data analysis techniques using data prerequisite tests and hypothesis testing, hypothesis testing is done simple linear regression analysis, t test, coefficient of determination. The results showed that variable X had an effect on alpha 5% or 95% confidence interval on variable Y, meaning that H0 was rejected and Ha was accepted where partially variable X had a positive effect on variable Y. The results of the R Square test showed that variable X had an effect on variable Y of 0,049 or 4,9% while the remaining 95.1% was influenced by variables outside the study such as inflation, population growth, more investment in capital-intensive projects, low social mobility, import substitution industrial policies, worsening exchange rates, and the destruction of the people's craft industry. This influence is relatively low but the government needs to address the high inequality of development between regions so that income distribution inequality can be reduced through policy.

Keywords:Inter-regional development inequality, income distribution inequality, income distribution.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSEMBAHAN i

KATA PENGANTAR ii

ABSTRAK iv

DAFTAR ISI vi

DAFTAR TABEL viii

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 10
C. Batasan Masalah 11
D. Rumusan Masalah 11
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 11
F. Penjelasan Judul 13

BAB II LANDASAN TEORI 14
A. Pembangunan Ekonomi 14
B. Ketimpangan Distribusi Pendapatan 19
C. Ketidakmerataan Pembangunan Antar Daerah 28
D. Pengaruh Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan. 30
E. Kajian Terdahulu 31
F. Kerangka Pemikiran 38
G. Hipotesis 38

BAB III METODE PENELITAN 39
A. Jenis Penelitian 39
B. Waktu Penelitian 39
C. Sumber Data 39
D. Defenisi Operasional Variabel 39
E. Teknik Pengumpulan Data 41
F. Instrumen Penelitian 42
G. Teknik Analisis Data 42
1. Uji Prasarat Data 42
2. Uji Hipotesis 44
a. Analisis Regresi Linear Sederhana 44
b. Uji *t* 44
c. Koefisien Determinasi 45

BAB IV PEMBAHASAN 47
A. Gambaran Umum Objek Penelitian 47
B. Gambaran Umum Penelitian 50
C. Hasil Analisis Penelitian.....51
D. Pembahasan 59

BAB V PENUTUP..... 61
A. Kesimpulan.....61
B. Saran 62

DAFTAR PUSTAKA..... 63

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Ketimpangan Distribusi Pendapatan 9
Tabel 1.2 Ketidakmerataan Pembangunan Antar Daerah..... 10
tabel 3.1 Pedoman Interpretasi Koefesien Determinasi 43
Tabel 4.1 Analisis Statistik Deskriptif 50
Tabel 4.2 Hasil Uji Homogenitas 53
Tabel 4.3 Uji Linearitas 53
Tabel 4.4 Uji Regresi Linear Sederhana 53
Tabel 4.3 Uji t 53
Tabel 4.3 Uji Koefisien Determinasi 53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 36
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas Probabiity Plot Ketidakmerataan Pembangunan Antar daerah..... 48
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas Probability Plot Ketimpangan Distribusi Pendapatan 49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan agar taraf hidup masyarakat meningkat,[1] pembangunan mencakup berbagai aspek yaitu perubahan dalam perilaku rakyat, struktur sosial, kelembagaan nasional, perubahan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, dan pengurangan ketimpangan pendapatan juga merupakan perubahan dalam pembangunan, terdapat trade off pada pembangunan ekonomi antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan pemerataan pendapatan, bila pembangunan ekonomi difokuskan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi disisi lain pemerataan pendapatan tidak bisa dilakukan dengan maksimal pada waktu yg singkat. Namun apabila pembangunan ekonomi difokuskan untuk melakukan pemerataan pendapatan, maka pertumbuhan ekonomi akan dihasilkan pada waktu yg cukup lama.[2]

Di Indonesia, pada masa orde baru pembangunan difokuskan pada peningkatan pertumbuhan yang tinggi, dimana kebijkan yang dianut yaitu *trickle down effect*, *trickle down effect* ialah penyebaran pembangunan dari pusat ke daerah lain. Dalam rencana tersebut, pembangunan ekonomi dimulai dari pulau jawa sebagai pusat pertumbuhan nasional dengan tujuan

[1] Arsyad, L. *Ekonomi Pembangunan Lanjutan*. Jakarta: Universitas Terbuka. 2014.

[2] Najwa Farrah , Imamudin Yuliadi. *Determinan Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia*. Proceedings The 1st UMYGrace 2020. Hal 129.

agar pembangunan wilayah tersebut dampaknya akan mengalir ke wilayah lain, namun setelah sepuluh tahun proses pembangunan terus berlanjut namun proses *trickle down effect* sangat lambat. Kemudian terjadi kesenjangan ekonomi dan tingginya jumlah penduduk miskin, setelah itu muncul permasalahan pada nilai tukar yang menciptakan resesi ekonomi yang besar dan berpengaruh terhadap peningkatan kemiskinan serta perbedaan dalam distribusi pendapatan.[3]

Distribusi pendapatan berkaitan dengan pemerataan di suatu wilayah untuk mengurangi ketimpangan antar masyarakat. Distribusi pendapatan juga bertujuan untuk menyediakan fasilitas dan penghidupan yang memadai bagi setiap warga negara. Distribusi pendapatan adalah distribusi pendapatan di daerah grafik. dalam pengertian lain, distribusi mengacu pada distribusi pendapatan melalui tenaga kerja dalam perolehan barang, jasa, dan perdagangan. Distribusi pendapatan bukanlah hal yang praktis karena dapat terpengaruh oleh banyak faktor yang bahkan dapat menyebabkan gagalnya pemerataan.[4]

Setiap warga negara berhak atas kesempatan yang sama untuk diperlakukan sama baik oleh negara maupun oleh sesama warganya, dan asas keadilan ini diperankan oleh agama terhadap manusia di segala bidang kehidupan, mulai dari agama, pendidikan, hingga kesehatan. hukum, politik, ekonomi. Allah Ta'ala telah menjelaskan perintah untuk bertindak adil dan konsekuensinya. Jika keadilan tidak diikuti, akan ada kejahatan dan

[3] Yogi, dkk. *Pengantar Ekonomika Wilayah*. Bandung: ITB. 2018. Hal 7
[4] Ns. Hidayati, dkk. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Sukaharjo: Pradina pustaka. Hal 143-144

permusuhan di antara warga negara.[5] Sebagaimana Firman Allah SWT QS: *An-nahl* [16]: 90;

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآيِٕ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

Artinya*: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*

عَنْ أَبِ ذَرٍّ الْغِارِيّ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْمَا يَرْوِيْه سبح نه وتعالى أَنَّهُ قَال: يَاعِبَدِي إِنِّي حَرَّمتُ الظَّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمً فَلاَ تَظَالَمُوا...

Dari Abu Dzar Al Ghifari radhiallahuanhu dari Rasulullah shallallahu`alaihi wa sallam sebagaimana beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza Wajalla bahwa Dia berfirman.”*wahai hamba-hamba-ku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diri ku dan aku menjadikannya haram diantara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi..”(HR muslim)*

Isi hadits ini adalah menegakkan keadilan di antara manusia dan melarang kezaliman di antara mereka adalah tujuan terpenting dari ajaran Islam. [6] dan Islam menekankan bahwa kekayaan tidak hanya dinikmati oleh orang kaya, tetapi kekayaan itu harus didistribusikan untuk orang miskin. sebagaimana firman Allah dalam QS: Al-Hasyr [59]: 7 yaitu:

مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِۙ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْۗ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْاۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِۘ

Artinya: *Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang*

[5] Nurul Huda. *Ekonomi Pembangunan Islam.* Jakarta.: Kencana: Hal 40.
[6] Muhyiddin Yahya Bin Syaraf Nawawi. *Hadits Arba'in Nawawiyah*. 2007

diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.

Ayat ini adalah hukum pembagian fai', dimana alasan pembagian aturan ini merupakan supaya aliran harta tidak terbatas pada kalangan orang-orang kaya saja, sebagai akibatnya kaum fakir tidak menerima bagian sedikitpun, akibatnya kaum kaya menindas kaum fakir serta membagi-bagi harta dikalangan mereka saja.[7] Rasulullah bersabda:

عَنْ مَعْمَر قَالَ قالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ

"Dari ma'mar ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: "barangsiapa yang menimbun barang, maka ia bersalah(berdosa)." HR. Muslim.

Islam menghalalkan hak milik eksklusif tetapi tidak membenarkan akumulasi harta eksklusif karena ini akan mengancam fondasi sosial Islam karena akumulasi kekayaan yang berlebihan bertentangan dengan kepentingan umum dan merusak mekanisme pasar yang adil karena kekayaan tidak beredar di antara orang-orang. Ketika hal ini terjadi, sah bagi pemerintah untuk menggunakan kekuasaannya untuk menyita secara paksa aset tersebut melalui instrumen zakat, kebijakan pembatasan kepemilikan eksklusif dapat dibenarkan dan diupayakan untuk mendorong terciptanya kondisi sosial yang sehat dan untuk mencapai landasan tersebut, distribusi yang adil di antara orang-orang.[8]

[7] Wahbah Az-Zuhali. *Tafsir Al-Wasith Jilid 3*. Jakarta : Gema Insani. 2013. Hal 620.

[8] Fordebi, Adesy. *Ekonomi Dan Bisnis Islam; Seri Konsep Dan Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016. Hal 283

Negara harus mengatur penggunaan sumber-sumber ekonomi ini agar didistribusikan secara adil dan merata, tidak ada bagian masyarakat yang dirugikan oleh negara atau anggota masyarakat lainnya untuk memperoleh hak akses atas sumber daya ekonomi tersebut.[9] Distribusi pendapatan yang adil merupakan ukuran yang penting. Jika sebagian penduduk berpenghasilan tinggi dan sebagian lainnya berpenghasilan rendah, maka keberhasilan pembangunan tidak sempurna.[10] Ketimpangan distribusi pendapatan adalah perbedaan pendapatan antar penduduk atau perbedaan pendapatan antara daerah maju dan daerah tertinggal. Koefisien gini atau indeks gini adalah ukuran ketimpangan atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan total, dengan angka mulai dari nol hingga satu. ketika mendekati nol, distribusi pendapatan menunjukkan pemerataan sempurna, dan sebaliknya, koefisien yang mendekati satu berarti distribusi pendapatan menunjukkan ketimpangan sempurna.[11]

Adelman dan Morris (1973) mengemukakan faktor faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di negara berkembang yaitu[12] ketidakmerataan pembangunan antar daerah, pertumbuhan penduduk yang pesat menyebabkan pendapatan per kapita mengalami penurunan, peningkatan inflasi yang tidak diikuti sebanding dengan penambahan produksi barang-barang, proyek-proyek padat modal yang sangat banyak

[9] Nurul Huda. *Ekonomi* .. Hal 40.
[10] Bonaraja Purba. Dkk. *Ekonomi Pembangunan*. Medan: Yayasan Kita Menulis. 2021
[11] Yery Arif Ramadhan , Setyo Wahyu Sulistyono. *Determinan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Karesidenan Malang Tahun 2015-2019*. Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE) Vol. 5, No. 4, November 2021. Hal 764.
[12] Udin Saripudin. *Rancang Bangun Model Pemberdayaan Ekonomi Petani Berbasis Ziswaf*. Bandung:Whidina Bhakti Persada Bandung. 2021. Hal 94.

diinvestasikan, rendahnya mobilitas sosial, melindungi usaha-usaha golongan kapitalis menggunakan kebijakan industri subsitusi impor yang dilaksanakan sehinggaharga barang-barang hasil industri meningkat, tidak elestisnya permintaan bagi barang-barang ekspor negara-negara sedang berkembang yang disebabkan oleh nilai tukar perdagangan yang memburuk bagi negara sedang berkembang dalam perdagangan daerah negara-negara maju, industri-industri kerajinan masyarakat yang hancur.

Ketidakmerataan pembangunan merupakan suatu keadaan dimana terdapat perbedaan kondisi wilayah antara daerah maju dan daerah tertinggal. Perbedaan ini bisa disebabkan daerah tertinggal tidak dapat memanfaatkan potensi wilayahnya secara maksimal dan kurangnya sumber daya yang tersedia bagi daerah tersebut sehingga menimbulkan kesenjangan antara daerah maju dan daerah tertinggal.[13]

Penyabab ketidakmerataan pembangunan antar daerah adalah[14]Perbedaan Kandungan sumber daya alam, dimana daerah yang memiliki sumber daya alam yang relatif tinggi menghasilkan barang dan jasa tertentu dengan biaya yang relatif rendah dibandingkan dengan daerah yang memiliki sumber daya alam yang relatif langka, perbedaan kondisi demografis, termasuk pertumbuhan dan struktur penduduk, perbedaan pendidikan dan kesehatan, Pekerjaan, perilaku dan kebiasaan, dimana secara geografis daerah berakar kuat cenderung memiliki tingkat produktivitas

[13] Kurniati Mansyur, Nursini. Hamrullah. *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan*. Vol 1 No 2, 2021. Hal 80.

[14] Sjafrizal, *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*, Jakarta: Rajawali Press, 2017, Hal 110-111

yang tinggi dan sebaliknya, mobilitas barang dan jasa tidak cair, dimana jika mobilitas tidak cair, surplus produksi dan tenaga kerja tidak digunakan selain yang membutuhkan daerah, konsentrasi kegiatan ekonomi daerah, apabila konsentrasi kegiatan ekonomi tersebut mendukung pembangunan daerah dengan meningkatkan pendapatan penduduk dan membuka lapangan kerja, demikian pula sebaliknya, alokasi dana untuk pembangunan, dengan syarat pemerintah dan swasta memberikan investasi kepada daerah dengan kegiatan ekonomi yang kuat, pembangunan akan berkembang dengan baik.

Akibat pembangunan yang tidak merata tersebut, terdapat perbedaan tingkat kemakmuran antar daerah, yang pada akhirnya menimbulkan masalah sosial politik, misalnya antara kota dan desa, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Keberadaan tipologi yang berbeda ini jelas tidak sesuai pembangunan dan oleh karena itu konsekuensinya dapat berupa jurang yang mencolok antara yang kaya dan yang miskin, dengan jurang yang melebar dari waktu ke waktu dan distribusi pendapatan menjadi tidak merata. Karena perbedaan tersebut, maka kemampuan daerah untuk mendorong laju pembangunan juga akan berbeda, karena setiap daerah cenderung memiliki daerah maju dan daerah terbelakang.[15] Untuk mengetahui ketidakmerataan pembangunan antar daerah dapat menggunakan indeks ketimpangan Williamson.[16]

[15]Erni Safitri, dkk. *Analisis Disparitas Pembangunan Antar Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi(Segi Ekonomi Dam Non Eknomi)*. Jurnal Paradigma Ekonomika Vol 16, No 1, 2021. Hal 142

[16]Sjafrizal, *Ekonomi*... Hal 110-111

Berikut data mengenai ketidakmerataan pembangunan antar daerah 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2019-2021.

Tabel 1.1
Ketidakmerataan pembangunan antar daerah(Indeks Wiliamson)

No	Provinsi	2019		2020		2021	
		X	Perkem-bangan (%)	X	Perkem-bangan (%)	X	Perkem-bangan (%)
1	Aceh	0.384	-	0.401	0.043	0.415	0.034
2	Sumatera Utara	0.576	-	0.557	(0.033)	0.556	(0.001)
3	Sumatera Barat	0.267	-	0.302	0.133	1.008	2.337
4	Riau	0.330	-	0.796	1.410	0.418	(0.474)
5	Kep. Riau	0.455	-	0.408	(0.104)	0.398	(0.023)
6	Jambi	0.841	-	0.749	(0.109)	1.053	0.406
7	Sumatera Selatan	0.718	-	0.735	0.024	0.738	0.004
8	Kep. Bangka Belitung	0.214	-	0.200	(0.065)	0.038	(0.809)
9	Bengkulu	0.402	-	0.422	0.049	0.424	0.003
10	Lampung	0.264	-	0.238	(0.099)	0.238	(0.001)
11	DKI Jakarta	0.520	-	0.492	(0.055)	0.484	(0.016)
12	Jawa Barat	0.691	-	0.728	0.054	0.733	0.007
13	Jawa Tengah	0.631	-	0.657	0.040	0.654	(0.004)
14	DI Yogyakarta	0.472	-	0.515	0.093	0.518	0.005
15	Jawa Timur	0.971	-	0.975	0.003	0.982	0.007
16	Banten	0.627	-	0.631	0.005	0.964	0.528
17	Bali	0.953	-	0.365	(0.617)	0.350	(0.042)
18	Kalimantan Barat	0.269	-	0.276	0.027	0.279	0.010
19	Kalimantan Tengah	0.189	-	0.216	0.144	0.218	0.010
20	Kalimantan Selatan	0.435	-	0.434	(0.002)	0.434	(0.001)
21	Kalimantan Timur	0.480	-	0.463	(0.036)	0.453	(0.021)
22	Kalimantan Utara	0.147	-	0.171	0.165	0.169	(0.014)
23	Sulawesi Utara	0.500	-	0.486	(0.028)	0.496	0.021
24	Sulawesi Tengah	1.001	-	1.110	0.110	1.522	0.370
25	Sulawesi Selatan	0.625	-	0.772	0.237	0.681	(0.118)
26	Sulawesi Barat	0.342	-	0.331	(0.035)	0.333	0.007
27	Sulawesi Tenggara	0.443	-	0.488	0.101	0.487	(0.001)
28	Nusa Tenggara Barat	0.570	-	0.719	0.261	0.705	(0.019)
29	Nusa Tenggara Timur	0.666	-	0.635	(0.046)	0.623	(0.019)
30	Gorontalo	0.531	-	0.191	(0.639)	0.194	0.012
31	Maluku	0.243	-	0.434	0.787	0.443	0.022
32	Maluku Utara	0.281	-	0.357	0.271	0.690	0.934
33	Papua Barat	1.464	-	1.491	0.018	1.447	(0.029)
34	Papua	1.176	-	1.486	0.264	1.837	0.236

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2022[17](*Lihat Lampiran ke 1)*

[17] *https://www.bps.co.id*

Namun apa yang terjadi pada tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atas kegiatan ekonomi yang digambarkan dalam data di atas? berikut data mengenai ketimpangan distribusi pendapatan Di Indonesia

Tabel 1.2
Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Indonesia (Indeks Gini)

No	Provinsi	2019		2020		2021	
		Y	Perkem-bangan (%)	Y	Perkem-bangan (%)	Y	Perkem-bangan (%)
1	Aceh	0.321	-	0.319	(0.002)	0.323	0.004
2	Sumatera utara	0.315	-	0.314	(0.001)	0.313	(0.001)
3	Sumatera barat	0.307	-	0.301	(0.006)	0.3	(0.001)
4	Riau	0.331	-	0.321	(0.010)	0.327	0.006
5	Jambi	0.324	-	0.316	(0.008)	0.315	(0.001)
6	Sumatera selatan	0.339	-	0.338	(0.001)	0.34	0.002
7	Bengkulu	0.329	-	0.323	(0.006)	0.321	(0.002)
8	Lampung	0.331	-	0.32	(0.011)	0.314	(0.006)
9	Kep.Bangka belitung	0.262	-	0.257	(0.005)	0.247	(0.010)
10	Kep. Riau	0.337	-	0.334	(0.003)	0.339	0.005
11	Dki jakarta	0.391	-	0.4	0.009	0.411	0.011
12	Jawa barat	0.398	-	0.398	0.000	0.406	0.008
13	Jawa tengah	0.358	-	0.359	0.001	0.368	0.009
14	Di yogyakarta	0.428	-	0.437	0.009	0.436	(0.001)
15	Jawa timur	0.364	-	0.364	0.000	0.364	0.000
16	Banten	0.361	-	0.365	0.004	0.363	(0.002)
17	Bali	0.37	-	0.369	(0.001)	0.375	0.006
18	Nusa tenggara barat	0.374	-	0.386	0.012	0.384	(0.002)
19	Nusa tenggara timur	0.355	-	0.356	0.001	0.339	(0.017)
20	Kalimantan barat	0.318	-	0.325	0.007	0.315	(0.010)
21	Kalimantan tengah	0.335	-	0.32	(0.015)	0.32	0.000
22	Kalimantan selatan	0.334	-	0.351	0.017	0.325	(0.026)
23	Kalimantan timur	0.335	-	0.335	0.000	0.331	(0.004)
24	Kalimantan utara	0.292	-	0.3	0.008	0.285	(0.015)
25	Sulawesi utara	0.376	-	0.368	(0.008)	0.359	(0.009)
26	Sulawesi tengah	0.33	-	0.321	(0.009)	0.326	0.005
27	Sulawesi selatan	0.391	-	0.382	(0.009)	0.377	(0.005)
28	Sulawesi tenggara	0.393	-	0.388	(0.005)	0.394	0.006
29	Gorontalo	0.41	-	0.406	(0.004)	0.409	0.003
30	Sulawesi barat	0.365	-	0.356	(0.009)	0.366	0.010
31	Maluku	0.32	-	0.326	0.006	0.316	(0.010)
32	Maluku utara	0.31	-	0.29	(0.020)	0.278	(0.012)
33	Papua barat	0.381	-	0.376	(0.005)	0.374	(0.002)
34	Papua	0.391	-	0.395	0.004	0.396	0.001

Sumber: Data Sekunder, 2022[18]

[18] *https://www.bps.co.id*

Berdasarkan data yang didapat dari BPS dapat ditemukan suatu fenomena gap atau teori tidak sejalan dengan fenomena yang ada dimana ketimpangan pembangunan naik namun ketimpangan distribusi pendapatan turun, seperti pada provinsi Aceh tahun 2019-2021 ketidakmerataan pembangunan naik yaitu dari 0,384 ke 0,401, tetapi ketimpangan distribusi pendapatan turun dari 0,321 ke 0,319, provinsi Sumatera barat pada tahun 2019-2020 ketidakmerataan pembangunan naik yaitu dari 0,267 ke 0,302, tetapi ketimpangan distribusi pendapatan turun yaitu dari 0.307 ke 0.301. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk membahas dalam penelitian ilmiah dengan judul: "Pengaruh ketidakmerataan pembangunan antar daerah Terhadap Ketimpangan Pendapatan 34 Provinsi Di Indonesia Tahun 2019- 2021."

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka muncul permasalahan yang dapat diidentifikasi peneliti yaitu sebagai berikut

1. Ketimpangan distribusi pendapatan yang diukur dengan koefisien gini dengan taraf sedang hingga tinggi merupakan permasalahan yang harus diselesaikan.
2. Ketidakmerataan pembangunan di berbagai daerah di indonesia masih tinggi.
3. Ketidakmerataan pembangunan di beberapa provinsi dalam beberapa tahun naik namun ketimpangan distribusi pendapatan turun

C. Batasan Masalah

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang diatas maka penulis membatasi penelitian dan memfokuskan hanya kepada pengaruh ketidakmerataan pembangunan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan 34 Provinsi Di Indonesia Tahun 2019-2021.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah ketidakmerataan pembangunan berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan 34 provinsi di Indonesia tahun 2019-2021?
2. Seberapa besar kemampuan ketidakmerataan pembangunan mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan 34 provinsi di Indonesia tahun 2019-2021?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Berdasarkan latar belakang, dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah:

   a. Menguji pengaruh ketidakmerataan pembangunan terhadap ketimpangan pendapatan 34 provinsi Di indonesia tahun 2019-2021

b. Mengetahui besar kemampuan ketidakmerataan pembangunan mempengaruhi ketimpangan pendapatan 34 provinsi Di indonesia tahun 2019-2021

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Secara Teorits

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharakan dapat memperkaya wawasan keilmuan mengenai behasan tentang ketidakmerataan pembangunan dan ketimpangan distribusi pendapatan, dan dapat menjadi rujukan pada penelitian selanjutnya mengenai pembangunan ekonomi.

b. Manfaat Secara Praktis

1) Bagi Akedemis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sumber penelitian untuk penelitian serupa atau yang mendekati dan memperluas kajian dan toeri pembangunan ekonomi regional.

2) Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan sekaligus acuan dalam mencermati pengaruh ketidakmerataan pembangunan terhadap ketimpangan pendapatan agar pemerintah mendapatkan langkah yang

efisien dalam mengatasi ketidakmerataan pembangunan dan ketimpangan distribusi pendapatan.

F. Penjelasan Judul

1. Ketimpangan Distribusi Pendapatan

   Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan masalah perbedaan pendapatan antara masyarakat atau perbedaan pendapatan antara daerah yang maju dengan derah yang tertinggal.[19]

2. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah

   ketidakmerataan pembangunan antar daerah merupakan suatu keadaan dimana adanya perbedaan kondisi daerah antara daerah yang maju dan daerah terbelakang. Munculnya perbedaan ini disebabkan karena daerah tertinggal belum mampu memaksimalkan potensi yang ada di daerahnya dan kurangnya sumber daya yang dimilikinya, sehingga terdapat jarak antara daerah maju dan daerah tertinggal.[20]

[19] Yery Arif Ramadhan , Setyo Wahyu Sulistyono. *Determinan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Karesidenan Malang Tahun 2015-2019*. Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE) Vol. 5, No. 4, November 2021. Hal 764.

[20] Alfi Nadia dkk. Analisis Ketimpangan Dalam Pembangunan Ekonomi Antarkota Di Provinsi Aceh Tahun 2008-2017. Prosiding SEMDI-UNAYA 4, no. 1 (2021): 304–140,

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan agar taraf hidup masyarakat meningkat,[21] pembangunan mencakup berbagai aspek yaitu perubahan dalam perilaku rakyat, struktur sosial, kelembagaan nasional, perubahan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, dan pengurangan ketimpangan pendapatan juga merupakan perubahan dalam pembangunan,[22] pembangunan ekonomi adalah suatu usaha dalam peerkonomian guna mengembangkan kegiatan ekonomi sehingga infrastruktur lebih baik, perusahaan semkin banyak, dan berkembang, taraf pendidikan semakin maju, dan tinggi, serta teknologi semakin meningkat.[23] Dalam pembangunan ekonomi terdapat trade off antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan pemerataan pendapatan, bila pembangunan ekonomi difokuskan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi dalam waktu singkat disisi lain pemerataan pendapatan tidak bisa dilakukan dengan maksimal pada waktu yg singkat. namun, apabila pembangunan ekonomi difokuskan buat melakukan pemerataan pendapatan, maka pertumbuhan ekonomi akan dihasilkan pada waktu yg cukup lama.[24]

---

[21] Arsyad, L. 2014. *Ekonomi Pembangunan Lanjutan*. Jakarta: Universitas Terbuka

[22] Najwa Farrah , Imamudin Yuliadi. *Determinan*... Hal 129

[23] Syaiful Anwar. Pengantar Pembangunan Ekonomi. Cirebon: Green Publisher Indonesia. 2022. Hal. 38.

[24] Najwa Farrah , Imamudin Yuliadi.… Hal 129

Dalam pemikiran islam, pembangunan di dasarkan pada firman Allah dalam QS: *Hud* [11] :61

وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًاۗ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۗهُوَ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا فَاسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ ۗاِنَّ رَبِّيْ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ

Artinya: *dan kepada kaum Tsamud (Kami utus) saudara mereka, Shalih. Dia berkata, "Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat (rahmat-Nya) dan memperkenankan (doa hamba-Nya)."*

هُوَ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ (*Dia telah menciptakan kamu dari bumi [tanah])* maksudnya adalah, memulai penciptaan kalian dari tanah, karena setiap manusia berasal dari tulang punggung Adam, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. وَاسْتَعْمَرَكُم (*dan menjadikan kamu pemakmurnya*) maksudnya adalah, menjadikan kalian sebagai pemakmurnya dan penghuninya. Pendapat lain menyebutkan, bahwa maknanya adalah memerintahkan kalian untuk memakmurkannya dengan pembangunan tempat tempat tinggal dan penanaman pepohonan.[25]

Dari ayat tersebut terdapat dua hal yang dikaitkan dengan aspek pembangunan yaitu kata "wasta'marokum" dan "ansya'akum minal ardi". Dalam menfsirkan ayat tersebut Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya yang berjudul Tafsir AlQurtubi, menurutnya ayat tersebut mengandung makna "perintah"karenakata "wasta'marokum" dalam ayat tersebut berakar dari kata "'amara" yang berarti perintah. Sehingga dalam ayat tersebut terdapat

[25] Imam Asy-Syaukani."*Tafsir Fathul Qadir*". Hal 379.

makna perintah untuk memakmurkan kehidupan dalam hal ini dikaitkan dengan aspek pembangunan. Pada kata lain "ansya'akum minal ardi" pemaknaannya dikaitkan dengan penciptaan manusia di muka bumi sebagai seorang khalifah.

Khurshid ahmad, dalam karyanya yang berjudul "*Economic Development in an Islamic Framework*" meletakkan dasar-dasar filosofi pembangunan yang diturunkan dari ajaran agama Islam, yaitu; tauhid, yang meletakkan dasar-dasar hubungan antara Allah-manusia dan manusia dengan sesamanya, rububiyyah, yang menyatakan dasar-dasar hukum Allah untuk selanjutnya mengatur model pembangunan yang bernafaskan Islam, khalifah, yang menjelaskan status dan peran manusia sebagai wakil Allah di muka bumi, pertanggungjawaban ini menyangkut manusia sebagai Muslim maupun sebagai anggota dari umat manusi, tazkiyyah, misi utama utusan Allah adalah menyucikan manusia dalam hubungannya dengan Allah, sesamanya, alam lingkungannya, masyarakat dan Negara.[26]

Pembangunan ekonomi memiliki banyak manfaat yang dapat diperoleh oleh suatu Negara, beberapa manfaat pembangunan ekonomi bagi suatu Negara adalah:[27]

1. Menciptakan lapangan kerja, dengan adanya pembangunan ekonomi yang pesat dan berkembang, masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan dikarenakan ketika pembangunan

[26] Restu Prana Ilahi, dkk." *Hubungan Agama Islam dan Pembangunan Ekonomi dalam Kemajuan Negara: Sebuah Tinjauan Umum"* Muaṣarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer Vol. 3 No. 2 2021. Hal. 38-40.

[27] Restu Prana Ilahi, dkk." *Hubungan*…. Hal. 42-44

ekonomi mulai digerakkan, secara otomatis diberbagai sector pembangunan terutama dibagian industry juga akan mengalami kemajuan dan dengan kemajuan ini akan membutuhkan banyak karyawan dalam melaksanakan industrinya.

2. Meningkatkan pendapatan nasional, dengan terciptanya lapangan pekerjaan, banyak posisi yang membutuhkan karyawan dan secara tidak langsung bisa mempengaruhi terhadap meningkatnya pendapatan Indonesia.
3. Melancarkan kegiatan ekonomi, alasannya kerena pembangunan ekonomi yang cepat diselesaikan didalamnya terdapat kegiatan ekonomi, sehingga jika pembangunan ekonomi tumbuh pesat maka kegiatan ekonomi di dalamnya pun bisa berjalan dengan lancer.
4. Berkembang pesatnya teknologi , maka kesejahteraan masyarakat dapat meningkat akan mendorong tercipanya perkembangan teknologi yang disertai dengan perkembangan ilmu pengetahuan
5. Mengurangi jumlah pengangguran, maka kesejahteraan masyarakat dapat meningkat serta banyaknya sektor industri yang mulai tumbuh dan membutuhkan banyak karyawan untuk berbagai posisi dan akan mengurangi pengangguran
6. Mensejahterakan masyarakat, dengan adanya pembangunan ekonomi maka kesejahteraan masyarakat dapat meningkat

dikarenakan tingkat pendapatan masyarakat meningkat dan pengangguran dapat berkurang.

7. Pendidikan dapat diperbaiki, dengan adanya pembangunan ekonomi, maka kesejahteraan masyarakat dapat meningkat sehingga masyarakat dapat menyekolahkan anak mereka dijenjang pendidikan yang lebih tinggi
8. Meningkatkan keahlian, dengan adanya pembangunan ekonomimembuat masyarakat bisa meningkatkan keahliannya melalui peran serta pemerintah dengan mendatangkan ahli dari luar.
9. Meningkatkan SDM dan SDA, dengan adanya pembangunan ekonomi kualitas SDM dan SDA juga akan meningkat
10. Meningkatnya investor asing mau pun local untuk bisa meanam modal di Indonesia, dengan adanya pembangunan ekonomi yang pesat , Indonesia semakin dipercaya untuk sebagai lahan tanam modal diberbagai sector industry yang ada.
11. Meningkatnya kepercayaan rakyat untuk bisa berkembang. Dengan adanya pembangunan ekonomi yang pesat bisa membuat masyarakat semakin yakin dan percaya diri untuk maju seiring dengan meningkatnya taraf kesejahteraan hidunya dengan program dan pembangunan ekonomi pemerintah.
12. Negara menjadi lebih tertata
13. Kenyamanan terjaga

14. Meningkatkan kepercayaan Negara lain, jika pembangunan ekonomi berkembang pesat, bisa membuat kepercayaan Negara lain terhadap pemerintahan Indonesia semakin meningkat sehingga Indonesia dapat dengan mudah kerjasama diplomatik dengan Negara lain
15. Melengkapi fasilitas Negara, salah satu bukti nyata dari pembangunan ekonomi adalah melengkapi fasilitas Negara, dimana fassilitas yang dulunya tidak ada menjadi ada setelah terjadi pembangunan ekonomi.

B. Ketimpangan Distribusi Pendapatan

a. Defenisi

Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan masalah perbedaan pendapatan antara masyarakat atau perbedaan pendapatan antara daerah yang maju dengan derah yang tertinggal.[28]

b. Indikator

1. Indeks Gini

Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur ketimpangan adalah indeks gini. Indeks Gini merupakan alat ukur yang paling umum digunakan sebagai indikator ketimpangan karena menggunakan pendekatan langsung untuk mengukur ketimpangan. Skor indeks gini berkisar dari 0 sampai 1. Skor 0 berarti kesetaraan total, karena setiap orang

[28] Yery Arif Ramadhan , Setyo Wahyu Sulistyono. *Determinan*... Hal 764.

mempunyai pendapatan yang sama. sementara nilai 1 menandakan ketimpangan mutlak, di mana pendapatan hanya dikuasai oleh 1% penduduk. Hasil rumus kemudian membagi tingkat ketimpangan pendapatan menjadi lima jenis, yaitu: ketimpangan sangat tinggi (koefisien Gini ≥ 0,0.8); ketidakteraturan besar (0,6-0,79); ketimpangan sedang (0,4–0,59); ketimpangan kecil (0.2-0,39); dan ketimpangan sangat rendah (<0,2).[29] Rumus dari koefisien gini adalah

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^{n} Pi(Fi + F\text{i} - 1)$$

GR: Koefisien gini

Pi : frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke -i

Fi : frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelass pengeluaran ke -i

Fi-1: frekuensi komulatif dari total pengeluaran dalam kelass pengeluaran ke(i-1)

2. Kurva Lorent

Kurva Lorenz merupakan indikator ketimpangan pendapatan yang dapat menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di seluruh bagian populasi. Sisi vertikal kurva Lorenz mewakili persentase kumulatif pendapatan

[29] Jajang W. Mahri. *Ekonomi Pembangunan Islam.* Jakarta: Depertemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah. 2021. Hal 216.

nasional, sedangkan sisi datar mewakili persentase kumulatif penduduk.[30]

3. Atkinson Indeks

Indeks Atkinson merupakan indikator untuk mengukur dan menilai kesejahteraan sosial atau tingkat kesejahteraan sosial dan distribusi pendapatan. Indikator ini memiliki dua tujuan yaitu untuk mengukur perbedaan antara dua keadaan kesenjangan distribusi pendapatan, seperti kesenjangan distribusi pendapatan sebelum dan sesudah program penyaluran zakat dan mengukur derajat social walfare loss.*[31]*

c. Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Kesenjangan pendapatan atau perbedaan pendapatan antara dua orang atau dua kelompok orang, dipengaruhi oleh perbedaan dalam banyak hal seperti perbedaan dalam kesempatan mendapatkan pekerjaan, gaji/upah yang diterima, subsidi yang didapat, ekses pendanaan, pendidikan, kesehatan, informasi, dan teknologi, pajak yang harus dibayar, jens pekerjaan yang dilakukan. Selain itu, praktik-ptaktik diskriminasi terkait gender, umur, agama, alumni dan lainnya juga menyebabkan terjadinya kesenjangan pendapatan.[32] Penyebab ketimpangan distribusi pendapatan di negara berkembang adalah[33]

---

[30] Eunike Cendanawangi, *Pengaruh Remitansi, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Periode 1987-2017*. CALYPTRA Vol.8 (2) Mei 2020.

[31] Irfan Syauki Beik. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Depok: Rajagrafindo. 2019. Hal 62.

[32] Tulus T.H Tambuna, *Perekonomian Indonesia* . Bogor: Rajagrafindo Persada, 2018. Hal 127

[33] Udin Saripudin. *Rancang Bangun…* Hal 94.

1) Pertumbuhan penduduk yang pesat menyebabkan pendapatan per kapita mengalami penurunan.
2) Peningkatan Inflasi yang tidak diikuti sebanding dengan penambahan produksi barang-barang.
3) Ketidakmerataan pembangunan antar daerah, Akibat pembangunan yang tidak merata tersebut, terdapat perbedaan tingkat kemakmuran antar daerah, yang pada akhirnya menimbulkan masalah sosial politik, misalnya antara kota dan desa, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Keberadaan tipologi yang berbeda ini jelas anti-pembangunan dan oleh karena itu konsekuensinya dapat berupa jurang yang mencolok antara yang kaya dan yang miskin, dengan jurang yang melebar seiring waktu dan distribusi pendapatan menjadi tidak merata.[34] Seperti pembangunan infrastruktur yang menjadi bagian dari transformasi teknologi industry dan system pendidikan suatu wilayah.[35] Dan Selain itu, Ketimpangan dalam distribusi pendapatan yang disebabkan perbedaan tingkat pembangunan, terjadi karena daerah yang pembangunan ekonominya pesat mempunyai kesempatan kerja lebih banyak

[34]Muhammad Hasan dan Muhammad Azis.*Pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat strategi pembangunan manusia dalam perspektif ekonomi lokal.* Makassar: Pustaka Taman Ilmu. 2019. Hal 69.

[35] Annisa ilmi Fared, dkk. *Pengantar ekonomi pembangunan.* Yayasan kita menulis. 2023. Hal 91

jika dibandingkan dengan daerah yang pembangunan ekonominya mengalami stagnasi[36]

4) Proyek-proyek padat modal yang sangat banyak diinvestasikan.
5) Rendahnya mobilitas sosial
6) Melindungi usaha-usaha golongan kapitalis menggunakan kebijakan industri subsitusi impor yang dilaksanakan sehingga harga barang-barang hasil industri meningkat
7) Tidak elestisnya permintaan bagi barang-barang ekspor negara-negara sedang berkembang yang disebabkan oleh nilai tukar perdagangan yang memburuk bagi negara sedang berkembang dalam perdagangan daerah negara-negara maju,
8) Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat

Selain itu arah konsep pembangunan ekonomi yang lebih menekan dan mengoptimalkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang diukur menggunakan Gross Domestic Product(GDP) daripada meminimalkan kemiskinan serta kesenjangan pendapatan (income disparities) dalam masyarakat sudah seharusnya dikaji kembali. Hal ini perlu dilihat oleh kita bersama bahwa konsep pembangunan ekonomi kemasyarakatan seharusnya diterapkan dalam perencanaan, strategi, kebijakan serta program kerja pembangunan ekonomi yang

[36] Tulus T.H Tambuna, *Perekonomian* ... Hal 127

lebih menekankan pada menyeimbangkan distribusi pendapatan dalam upaya mengatasi kemiskinan.[37]

d. Distribusi Pendapatan Dalam Islam

Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang muncul dari sistem sosial Islam untuk memberikan solusi atas berbagai permasalahan dan menciptakan keadilan dalam ekonomi kerakyatan.[38] Prinsip distribusi dalam ekonomi islam adalah[39] keadilan dan kesetaraan, keadilan dalam islam merupakan prinsip fundamental dalam segala aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi, islam menginginkan keadilan dalam distribusi pendapatan, keadilan distributif merupakan tujuan pembangunan yang membutuhkan keterlibatan umat Islam untuk mencapainya.

Setiap warga negara berhak atas kesempatan yang sama untuk diperlakukan sama baik oleh negara maupun oleh sesama warganya, dan asas keadilan ini harus dilaksanakan oleh agama terhadap manusia di segala bidang kehidupan, mulai dari agama, pendidikan, hingga kesehatan. hukum, politik, ekonomi. Seperti jalan tegas Allah SWT yang menunjukkan tatanan perilaku dan konsekuensi yang benar.[40] Allah Ta'ala telah menjelaskan perintah untuk

[37] Jacob Makapedua. dkk *Distribusi Pendapatan Dan Kemiskinan(Beberapa Kajian Kebijakan)*. AKULTURASI: jurnal ilmiah agrobisnis perikanan. Vol. 11 No. 1. No 159.
[38] Fordebi, Adesy. *Ekonomi*... Hal 283
[39] Idri. *Hadis Ekonomi Dalam Persepektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana. 2015 Hal 150-153
[40] Nurul Huda. *Ekonomi*... 2017. Hal 40.

bertindak adil dan konsekuensinya. Jika keadilan tidak diikuti, akan ada kejahatan dan permusuhan di antara warga negara. Sebagimana firman Allah SWT QS: *An-nahl* [16]: 90.

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآيِٕ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

Artinya*: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*

عَنْ أَبِ ذَرٍّ الْغِارِيِّ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْمَا يَرْوِيْه سبح نه وتعالى أَنَّهُ قَال: يَاعِبَدِي إِنِّي حَرَّمتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمً فَلاَ تَظَالَمُوا...

Dari Abu Dzar Al Ghifari radhiallahuanhu dari Rasulullah shallallahu`alaihi wa sallam sebagaimana beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza Wajalla bahwa Dia berfirman.”*wahai hamba-hamba-ku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diri ku dan aku menjadikannya haram diantara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi..”(HR muslim)*

Kandungan hadis ini adalah menegakkan keadilan di antara manusia serta melarang kezaliman di antara mereka adalah tujuan yang paling penting dari ajaran islam.[41]

Prinsip keadilan dan pemerataan distributi juga berarti bahwa kekayaan tidak dapat dipusatkan pada sekelompok orang tetapi harus didistribusikan ke seluruh masyarakat, bahwa produksi kekayaan nasional harus dibagi rata, dan bahwa Islam melarang dan mewajibkan akumulasi kekayaan yang dibelanjakan untuk kepentingan

[41] Muhyiddin Yahya Bin Syaraf Nawawi. *Hadits Arba'in Nawawiyah*. 2007.

masyarakat.[42] Distribusi pendapatan berdampak besar pada kesejahteraan masyarakat, yang sejalan dengan tujuan fundamental Islam, yaitu kesejahteraan pemeluknya di dunia dan di akhirat. Hal ini tercapai apabila kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi secara memadai sehingga tidak ada kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin, konsep ini sejalan dengan prinsip Maqasid Syariah yaitu mengejar kebaikan masyarakat dengan menyingkirkan segala macam yang menimbulkan kerugian, dengan terpenuhinya syarat tersebut akan meminimalisir segala jenis kejahatan.[43] Oleh sebab itu, Islam menegaskan bahwa ada hak atas kekayaan orang kaya yang harus dibagikan kepada orang miskin, jangan sampai kekayaan hanya dimiliki oleh orang kaya. sebagaimana firman Allah dalam QS: *Al-Hasyr* [59]: 7 yaitu:

مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِۙ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْۗ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْاۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِۘ

Artinya: *Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.*

[42] Idri. Hadis Ekonomi Dalam Persepektif Hadis Nabi... Hal 151.

[43] Abdul Ghofur. *Pengantar Ekonomi Syariah : Konsep Dasar, Paradigm, Pengambangann Ekonomi Syariah*. *Depok* : RajaGrafindo persada.

Ayat ini adalah hukum pembagan fai', dimana alasan pembagian hukum ini adalah agar peredaran harta tidak terbatas di kalangan orang-orang kaya saja, sehingga kaum fakir tidak mendapatkan bagian sedikitpun, akibatnya kaum kaya menindas kaum fakir dan membagi-bagi harta dikalangan mereka saja.[44] Islam mengedepankan tercapainya pemerataan ekonomi dengan tidak berpihak pada kelompok tertentu. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap manusia untuk menggunakan sumber daya untuk mendapatkan kekayaan dan dengan memaksa mereka yang memiliki kekayaan berlebih untuk mengeluarkan zakat untuk mensucikan kekayaan dari hak orang lain.[45] Rasulullah bersabda:

عَنْ مَعْمَر قَالَ قالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ

Dari ma'mar ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: "barangsiapa yang menimbun barang, maka ia bersalah(berdosa)." (HR. Muslim).

Oleh karena itu, negara harus mengatur penggunaan sumber daya ekonomi tersebut agar dapat didistribusikan secara adil dan merata. Bahwa tidak ada anggota masyarakat yang dirugikan,

[44] Wahbah Az-Zuhali. *Tafsir Al-Wasith*... Hal 620.

[45] Aditama Dewantara. *Etika Distribusi Ekonomi Islam:Perbandingan Sistem Distribusi Kapitalis Dengan Sistem Distribusi Islam*. Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam vol 4 no 1. 2020. Hal 25-28

melainkan diberikan hak akses atas sumber daya ekonomi tersebut oleh negara atau anggota masyarakat lainnya.[46]

C. Ketidakmerataan Pembangunan Antar Daerah

a. Defenisi

ketidakmerataan pembangunan antar daerah merupakan suatu keadaan dimana adanya perbedaan kondisi daerah antara daerah yang maju dan daerah terbelakang, Munculnya perbedaan ini disebabkan karena daerah tertinggal belum mampu memaksimalkan potensi yang ada di daerahnya dan kurangnya sumber daya yang dimilikinya, sehingga terdapat jarak antara daerah maju dan daerah tertinggal.[47]

b. Indikator

1) Indeks Wiliamson

Indeks Wiliamson merupakan Indicator yang digunakan untuk mengetahui tingkat ketidakmerataan pembangunan antar daerah.[48]

$$V_w = \frac{\sqrt{\sum_{i=j}^{n}(y_i - y)^2 (f_i/n)}}{y}$$

Dimana :

Vw = Koefisien Variasi Williamson (Indeks Williamson)

Yi = PDRB Per Kapita Daerah kab/kota di Indonesia

[46] Nurul Huda. *Ekonomi*…. Hal 40.
[47] Alfi Nadia. Dkk *Analisis Ketimpangan*…. Hal 306.
[48] Sjafrizal, *Ekonomi Wilayah dan*.., Hal 110-111

Y = PDB per kapita provinsi

f i = Jumlah penduduk kab/kota

i = Wilayah

n = Jumlah penduduk provinsi

Sedangkan indeks ketimpangan pembangunan ekonomi diberikan dengan angka 0 sampai dengan 1 atau 0 <; Vw < 1. Lebih dekat ke 0 berarti lebih sedikit ketimpangan dan lebih dekat ke 1 berarti lebih banyak ketimpangan. Data ketimpangan pembangunan antar daerah diolah penulis dengan menggunakan data yang bersumber dari BPS.

2) Theil Indeks

Data yang diperlukan dalam penelitian ini sama dengan yang diperlukan untuk mengukur indeks wiliamson yaitu PDRB dan jumlah penduduk untuk setiap wilayah. Demikian juga dengan penafsirannya yang juga sama yaitu bila indeks mendekati 1 sangat timpang dan sebaliknya jika indeks mendekati 0 berarti sangat merata.[49] Formulasi thail indeks tersebut adalah sebagai berikut:

$$T = \sum_{i=j}^{n} \sum_{i=j}^{n} \{y_{ij} /Y\} \log[\{ y_{ij}/\{n_{ij}/N\}]$$

Dimana:

[49] Sjafrizal, *Ekonomi Wilayah* .., Hal 111

Y_{ij}= PDRB per kappita kabupaten I di provinsi j

Y = jumlah PDRB per kapita seluruh provinsi j

n = jumlah penduduk kabupaten I di provinsi j

n = jumlah penduduk seluruh kabupaten

D. Pengaruh Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan.

Adelman dan Morris (1973) mengemukakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di negara berkembang adalah[50] ketidakmerataan pembangunan antar daerah, Akibat pembangunan yang tidak merata tersebut, terdapat disparitas tingkat kemakmuran antar daerah, hingga pada akhirnya menimbulkan masalah sosial politik, misalnya antara kota dan desa, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Keberadaan tipologi yang berbeda ini jelas anti-pembangunan dan oleh karena itu konsekuensinya dapat berupa jurang yang mencolok antara yang kaya dan yang miskin, dengan jurang yang melebar dari waktu ke waktu dan distribusi pendapatan menjadi tidak merata.[51]

Penelitian oleh Sanjay Kumar Rout & Rajeswari Behera (2022). *Income Inequality and its Important Determinants in India*. Menggunakan model kointegrasi yaitu: FMOLS, DOLS, CCR, DAN ARDL, meneliti dampak jangka panjang dan jangka pendek dari bencana alam, pembangunan ekonomi, inovasi teknologi,dan sumber daya manusia di india. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bencana alam dan pembangunan

[50] Udin Saripudin. *Rancang Bangun…* Hal 94.
[51] Muhammad Hasan dan Muhammad Azis.*Pembangunan*... Hal 69.

ekonomi memperburuk ketimpangann pendapatan jangka panjang dan jangka pendek, pembangunan ekonomi memperburuk ketimpangan pendapatan disebabkan kerena kue pembangunan ekonomi tidak terdistribusi secara merata di antara seluruh lapisan masyarakat. [52]

E. Kajian Terdahulu

Penelitian yang relevan memuat temuan-temuan penelitian yang berkaitan dengan persoalan yang akan diteliti, oleh karena itu berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada hasil-hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan yang penulis angkat yaitu:

Penelitian oleh Neva Rodiyatul Sholikah dan Niniek Imaningsih, dengan judul penelitian tentang "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2021Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia dan tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Dalam hal ini, alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi. data panel, jika ada Data yang berasal dari BPS atau sebagai data sekunder untuk periode 2012-2021 dengan menggunakan Fixed Effects Model (FEM)sebagai model yang dipilih Berdasarkan studi ini, ditemukan bahwa pertumbuhan ekonomi, Pembangunan Manusia Indeks dan tingkat pengangguran terbuka bersatu secara bersamaan berdampak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan

[52] Sanjay Kumar Rout & Rajeswari Behera. *Income Inequality and its Important Determinants in India*. Saudi J Econ Fin, 6(5). 2022: Hal. 171-187.

variabel pertumbuhan ekonomi berdampak positif dan dapat diabaikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan akibat semakin timpangnya distribusi pendapatan. Pada variabel Indeks Pembangunan Manusia, hal ini tidak berdampak negatif signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, karena produktivitas tenaga kerja yang baik dapat mengurangi ketimpangan. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka berdampak positif dan signifikan karena penyerapan tenaga kerja yang ada masih kurang optimal.[53] Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu dimana penelitian ini menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia serta tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan penelitian sekarang hanya menguji pengaruh ketidakmerataan pembangunan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan 34 provinsi di Indonesia periode tahaun 2019-2021.

Penelitian oleh Bustam Anggun Pamiati dan Nenik Woyanti, dengan judul penelitian Analisis pengaruh populasi, pertumbuhan ekonomi, tpak dan ipm terhadap ketimpangan pembangunan di kawasan barlingmascakeb 2013-2019. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: 1) klasifikasi perkembangan ekonomi kabupaten di wilayah Barlingmascakeb berdasarkan tipologi kelas tahun 2019; 2) ketimpangan pembangunan antar kelurahan di wilayah Barlingmascakeb; 3) dampak pertumbuhan penduduk, pertumbuhan

[53] Neva Rodiyatul Sholikah dan Niniek Imaningsih, *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2021*. Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE) Vol. 10 No. 3 (2022). Hal 247

ekonomi, TPAK dan IPM terhadap ketimpangan pembangunan di wilayah Barlingmascakeb periode 2013-2019. Penelitian ini menggunakan tipologi kelas, indeks Williamson dan analisis regresi data panel menggunakan metode Fixed Effects Model (FEM)dengan periode penelitian 2013-2019. Hasil analisis Tipologi Klassen menunjukkan bahwa Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas dan Kebumen termasuk dalam kelompok daerah berkembang pesat, sedangkan Cilacap termasuk dalam kelompok daerah maju tetapi menurun. Analisis Indeks Williamson menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan di wilayah Barlingmascakeb tergolong rendah dan cenderung menurun. Selain itu, berdasarkan hasil analisis regresi diketahui bahwa jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, TPAK,dan IPM secara simultan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap evolusi ketimpangan di wilayah Barlingmascakeb tahun 2013-2019.[54] Perbedaan penelitian penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu dimana penelitian ini menggunkan variabel ketimpangan pembangunan sebagai variabel dependen dan pengaruh populasi, pertumbuhan ekonomi, tpak dan ipm sebagai variabel independen, sedangkan penelitian sekarang menggunakan variabel ketidakmerataan pembangunan sebagai variabel independen dan ketimpangan distribusi pendapatan sebagai varaibel dependen.

[54] Bustam Anggun Pamiati, Nenik Woyant. *Analisis Pengaruh Populasi, Pertumbuhan Ekonomi, TPAK Dan IPM Terhadap Ketimpangan Pembangunan Di Kawasan Barlingmascakeb 2013-2019*. BISECER (Business Economic Entrepreneursh ip) Vol. 4 No. 1, Januari 2021 (2021). Hal 17.

Penelitian oleh Sri Endang Rahayu, dengan judul penelitian Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Indonesia, Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk mendeskripsikan dan menganalisis ketimpangan variabel distribusi pendapatan di Indonesia. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu data tentang ketimpangan distribusi pendapatan yang tercermin dalam Indeks Gini periode 2010-2020. PDB per kapita Indonesia dan pertumbuhan ekonomi meningkat dari tahun 2010 hingga 2019, danakan mencatat penurunan pada tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak membuat distribusi pendapatan semakin merata, tetapi memperdalam ketimpangan distribusi pendapatan, seperti yang ditunjukkan oleh koefisien Gini di Indonesia tahun 2011-2015 di kisaran 0,406-0,41. Namun dari tahun 2016 hingga tahun 2020, koefisien Gini di Indonesia turun dibawah 0,40 yaitu tahun 2016 menjadi 0,307 dan tahun 2020 menjadi 0,381.[55] Perbedaan penelitian penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu dimana penelitian ini menganalisis ketimpangan distribusi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi, sementara penelitian sekarang melihat pengaruh ketidakmerataan pembangunan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

Penelitian oleh Sanjay Kumar Rout & Rajeswari Behera (2022). *Income Inequality and its Important Determinants in India*. Menggunakan model kointegrasi yaitu: FMOLS, DOLS, CCR, DAN ARDL, meneliti

[55] Sri Endang Rahayu, *Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Indonesia*. SinteSa Vol. 1 No. 1 (2021). Hal 1157.

dampak jangka panjang dan jangka pendek dari bencana alam, pembangunan ekonomi, inovasi teknologi,dan sumber daya manusia di india. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bencana alam dan pembangunan ekonomi memperburuk ketimpangann pendapatan baik jangka panjang maupun jangka pendek, inovasi teknologi meningkatkan distribusi pendapatan dan sumber daya manusia menurunkan ketimpangann pendapatan. Pembangunan ekonomi memperburuk ketimpangann pendapatan disebabkan kerena kue pembangunan ekonomi tidak terdistribusi secara merata di antara seluruh lapisan masyarakat. [56] Perbedaan penelitian penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu dimana penelitian ini menganalisis dampak jangka panjang dan jangka pendek dari bencana alam, pembangunan ekonomi, inovasi teknologi,dan sumber daya manusia di india, sedangkan penelitian sekarang menggunakan variabel ketidakmerataan pembangunan sebagai variabel X dan ketimpangan distribusi pendapatan sebagai varaibel Y.

Penelitian oleh Noviar. Dengan judul penelitian "Analisis Ketimpangan Dan Klasifikasi Pembangunan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten Tahun 2016-2020" Tujuan penelitian ini adalah mengkaji ketimpangan pembangunan ekonomi dan menentukan klasifikasi kabupaten/kota di Banten tahun 2016-2020 dengan menggunakan indeks Williamson dan pendekatan tipologi kelas. Menurut hasil perhitungan

[56] Sanjay Kumar Rout & Rajeswari Behera. *Income Inequality and its Important Determinants in India*. Saudi J Econ Fin, 6(5). 2022: Hal. 171-187.

indeks Williamson tahun 2016-2020, angka indeks selalu lebih besar dari 0,7 dan mendekati 1. Kondisi ini menunjukkan bahwa disparitas pembangunan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Banten tidak merata dan cukup signifikan. mereka menunjukkan kabupaten/kota. Perbedaan pusat kegiatan ekonomi daerah merupakan salah satu penyebab perbedaan yang besar dalam pembangunan ekonomi daerah. Berdasarkan hasil kajian dengan menggunakan analisis tipologi klasen, ditemukan bahwa sebagian besar kabupaten/kota di Banten tahun 2016-2020 masuk dalam klasifikasi daerah cepat tumbuh yaitu lima kota. Selain itu, terdapat kawasan yang tergolong kawasan tumbuh tinggi dan cepat,kawasan tergolong maju namun tertekan, bahkan terdapat kawasan sub-par Provinsi Banten yang tergolong kawasan relatif tertinggal.[57] Perbedaan penelitian sekarang dengan sebelumnya adalah, penelitian ini bertujuan untuk melihat ketimpangan pembangunan ekonomi dan menunjukkan klasifikasi wilayah sementara penelitian sekarang bertujuan menguji dan mengetahui seberapa besar pengaruh ketidakmerataan pembangunan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

Penelitian oleh Berliana Ivanovi Sulistyaningrum, Ardito Bhinadi, Rini Dwi Astuti dengan judul pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Provinsi-Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2011-2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak

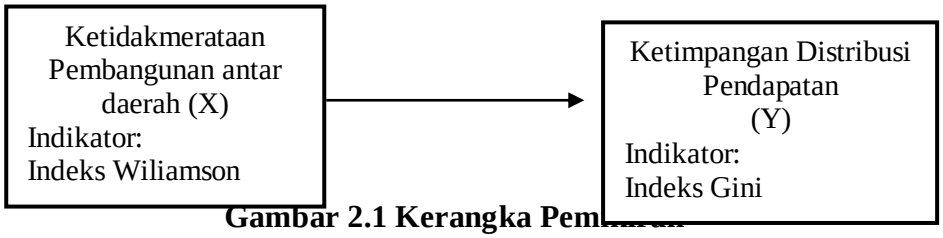
[57] Noviar. *Analisis Ketimpangan Dan Klasifikasi Pembangunan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten Tahun 2016-2020*. Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, Vol.5, No.1, Juni 2021. Hal 24.

pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (HPI) dan Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa tahun 2011 sampai dengan tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Jenis data yang digunakan berasal dari sumber sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang digunakan adalah data panel dari enam provinsi di Pulau Jawa. Alat analisis yang digunakanadalah prosedur regresi data panel menggunakan Stata 16 dan Indeks Gini digunakan sebagai indikator yang memvisualisasikan ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berdampak pada ketimpangan distribusi pendapatan. Indeks Pembangunan Manusia (HPI) tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dan Upah Minimum Provinsi (UMP) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.[58] Perbedaan penelitian penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu dimana penelitian ini menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan, sedangkan penelitian sekarang menggunakan variabel ketidakmerataan pembangunan sebagai variabel X dan ketimpangan distribusi pendapatan sebagai varaibel Y.

[58] Berliana Ivanovi Sulistyaningrum, Ardito Bhinadi, Rini Dwi Astuti. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Provinsi-Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2011-2020*. Sinomika Journal Vol 1 No.4. 2022. Hal 891.

F. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori yang dipaparkan di atas, maka dapat digambarkan kerangka dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Keterangan:

: Variabel Dan Indikator

: Penghubung

G. Hipotesis

Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah :

H0: Tidak ada pengaruh ketidakmerataan pembangunan antar daerah terhadap ketimpangan distribusi pendapatan

Ha: Terdapat pengaruh ketidakmerataan pembangunan antar daerah terhadapketimpangan pendapatan

BAB III

METODE PENELITAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kausal komparatif dengan pendekatan kuantitatif yaitu penelitian yang memberikan gambaran lebih detail mengenai suatu gejala berdasarkan data yang. Penelitian ini akan meneliti tentang data kajian yang bersifat numerik/ angka mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data, serta penampilan dari hasilnya itu dituntut untuk menggunakan angka.

B. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dimulai dari bulan oktober tahun 2022 sampai mei tahun 2023. *(lihat lampiran 2)*

C. Sumber Data

Adapun data yang saya butuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder dimana data yang diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai sumber yang telah ada, kemudian buku dan jurnal mengenai ketidakmerataan pembangunan dan ketimpangan distribusi pendapatan yang terkait dengan penelitian.

D. Defenisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis variable penelitian yaitu variable terikat (dependent variable) dan variabel bebas (independent variable).

a. Variabel Terikat (Variabel Dependen) dalam penelitian ini adalah ketimpangan distribusi pendapatan atau variable Y, ketimpangan distribusi pendapatan adalah perbedaan pendapatan antara masyarakat atau perbedaan pendapatan antara daerah yang maju dengan derah yang tertinggal.[59] Alat ukut yang digunakan adalah Indeks Gini[60]

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^{n} Pi(Fi + F\text{i} - 1)$$

GR: Koefisien gini

Pi : frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke -i

Fi : frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelass pengeluaran ke -i

Fi-1: frekuensi komulatif dari total pengeluaran dalam kelass pengeluaran ke(i-1)

b. Variabel bebas (variable independen). Dalam penelitian ini ketidakmerataan pembangunan antar daerah (X), ketidakmerataan pembangunan antar daerah adalah Keadaan dimana adanya perbedaan kondisi daerah antara daerah yang maju dan daerah

[59] Yery Arif Ramadhan , Setyo Wahyu Sulistyono. *Determinan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Karesidenan Malang Tahun 2015-2019*. Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE) Vol. 5, No. 4, November 2021. Hal 764.

[60] Meiki Permana, *Degradasi lingkungan: pendekatan kajian lingkungan yang berkelanjut*. CV Nas Media Pustaka:Yogyakarta. 2021. Hal 29-30.

terbelakang.[61] alat ukur ketidakmerataan pembangunan antar daerah yang digunakan adalah indeks ketimpangan Williamson[62]

$$V_w = \frac{\sqrt{\sum_{i=j}^{n}(y_i - y)^2 (f_i/n)}}{y}$$

Dimana :

Vw: (Indeks Williamson)

Yi :PDRB Per Kapita Daerah kab/kota di Indonesia

Y : PDB per kapita provinsi

Fi :Jumlah penduduk kab/kota

i : Wilayah

n :Jumlah penduduk provinsi

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian ini dengan cara meninjau buku-buku, jurnal dan referensi lainnya yang terkait dengan ketidakmerataan pembangunan antar daerah dan ketimpangan distribusi pendapatan, kemudian untuk pengumpulan data

[61] Kurniati Mansyur1, Nursini2, Hamrullah. *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan*. Vol 1 No 2, 2021. Hal 80.

[62] Sjafrizal, *Ekonomi Wilayah* ... Hal 110-111

yang terkat dengan yang terjadi dilapangan dilakukan dengan meninjau referensi dari laporan badan pusat statistic (BPS).

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan adalah dokumentasi, dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data mengenai hal-hal berupa buku-buku ekonomi pembangunan dan distribusi pendapatan, jurnal-jurnal, serta data indeks gini, jumlah penduduk dan PDRB kabupatan/ kota di Indonesia.

G. Teknik Analisis Data

1. Uji Prasarat Data

   a. Uji Normalitas

      Tujuan dari Uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah masingmasing variabel berdistribusi nomal atau tidak, dilakukan Uji Normal Probability Plot (NPP) biasa digunakan dalam analisis regresi untuk menguji hipotesis normalitas, yaitu untuk menentukan apakah suatu kesalahan atau kesalahan acak (random error) berdistribusi normal atau tidak. Jika grafik cenderung mengikuti garis lurus, maka data berdistribusi normal.[63]

[63]Maria Angeline, "Pengaruh Fasilitas Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa Di Kelas III SD NEGERI 060938 KEC. Medan Johor Tahun Ajaran 2021/2022," Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, Saintek, Sosial dan Hukum (PSSH) 1 (2022): 37

b. Uji Homogenitas

Untuk menunjukkan apakah dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi dengan varians yang sama atau tidak dilakukan Uji homogenitas. Dengan kata lain, homogenitas berarti kumpulan data yang diperiksa memiliki karakteristik atau sifat yang sama.[64] Pengujian dilakukan dengan uji *Levane* dengan kriteria:

1) jika nilai sig > 0,05 maka dapat dikatakan bahwa variasi dari dua data adalah sama (homogen).
2) jika nilai sig < 0,05 maka dapat dikatakan bahwa variasi dari dua data adalah tidak sama (tidak homogen).

c. Uji Linearitas

Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui linearitas data, yaitu apakah variabel bebas yaitu ketidakmerataan pembangunan antar daerah mempunyai hubungan linier dengan variabel terikat yaitu ketimpangan distribusi pendapatan. menggunakan (*Deviation for Linearity*) dengan ketentuan sebagai berikut:[65]

1) jika nilai sig >0,05 maka dinyatakan variabel independen mempunyai hubungan linear dengan variabel dependen.

[64] Nuryadi. *Dasar-Dasar Statistik Penelitian*...Hal 79

[65] Rochmat Aldy Purnomo. *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis Dengan SPSS*. Ponorogo: UNMUH Ponorogo Press. 2016.Hal 94

2) jika nilai sig <0,05 maka dinyatakan variabel independen tidak mempunyai hubungan linear dengan variabel dependen.

2. Uji Hipotesis

a. Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk memprediksi dan meramalkan pengaruh atau antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y).[66]

Bentuk persamaan dari regresi untuk regresi linier sederhana yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$Y = \beta 0 + \beta 1X + \varepsilon i$

Keterangan:

Y : ketimpangan distribusi pendapatan

X : Ketidakmerataan Pembangunan Antar daerah

β1: Koefisien regresi, yaitu nilai peningkatan atau penurunan variabel Y' yang didasarkan variabel X

β0: Konstanta

εi : error term

b. Uji *t*

Untuk menjawab rumusan masalah no satu dalam penelitian ini digunaka uji t, uji *t* digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen yaitu ketidakmerataan

[66] Rochmat Aldy Purnomo. *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis Dengan SPSS* ... Hal 147

pembangunan antar daerah (X) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen yaitu ketimpangan distribusi pendapatan (Y) secara parsial (terpisah).[67] Kriteria dalam pengujian ini adalah:

1) Jika nilai signifikansi < 0,05 dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.
2) Jika nilai Signifikansi > 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

c. Koefisien Determinasi

Koefesien determinasi (R^2) merupakan koefesien yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Nilai koefesien determinasi yaitu antara 0 dan 1. Jika nilai R^2 kecil itu berarti kemampuan variabel-variabel dependen dalam menjalankan varibel dependen sangat terbatas. Jika R^2 sama dengan 0 maka variabel dependen tidak memilik pengaruh terhadap variabel dependen. Namun, jika R^2 mendekati 1 maka variabel independen berpengaruh sempurna tehadap variabel dependen.[68]

[67] Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publising, 2015), Hal. 56

[68] Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif*, Hal. 158.>80%

Tabel 3.1

Pedoman Interpretasi Koefesien Determinasi[69]

Pernyataan	Keterangan
< 4%	Pengaruh rendah sekali
5%-16%	Pengaruh rendah tapi pasti
17%-49%	Pengaruh cukup berarti
50%-81%	Pengaruh tinggi atau kuat
>80%	Pengaruh tinggi sekali

[69] J . Supranto. Statistik Teori dan Aplikasi . Jakarta : Penerbit Erlangga. 2016. Hal. 227

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Letak Dan Kondisi Geografis Indonesia

Secara astronomis, Indonesia terletak antara 6^0 04' 30" Lintang Utara dan 110 00' 36" Lintang Selatan serta antara 94^0 58' 21" dan 141^0 01' 10"bujur Timur dan dilalui oleh garis garis khatulistiwa yang terrlrtak pada garis lintang 0^0.

Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia memiliki batas-batas sebagai berikut:

a. Utara–Negara Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Thailand, Palau, dan Laut Cina Selatan;

b. Selatan–Negara Australia, Timor Leste, dan Samudera Hindia;

c. Barat–Samudera Hindia;

d. Timur–Negara Papua Nugini dan Samudera Pasifik.

Perbatasan ini ada di 111 pulau terluar dan harus diperhatikan dan dikelola dengan baik. Pulau-pulau tersebut digunakan untuk menentukan garis pangkal batas wilayah Indonesia dengan negara lain (Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar). Dan Indonesia beada di antara benua asia dan benua Australia serta diantara samudera hindia dan samudera pasifik.

Indonesia memiliki luas 1916.906,77 km2 dengan total 16.766 pulau. Ujung barat nusantara adalah Sabang, ujung timur Merauke,

ujung utara Miangas dan ujung selatan Pulau Rote. Indonesia berada di zona iklim tropis dan terletak di belahan timur. Merupakan negara dengan 3 zona waktu yaitu WIB, WITA dan WIT. Karena letak geografisnya, kepulauan Indonesia terletak di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Indonesia terdiri dari 34 provinsi di lima pulau utama dan empat kepulauan, yaitu:

a. Pulau Sumatera: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung.
b. Kepulauan Riau: Kepulauan Riau.
c. Kepulauan Bangka Belitung: Kepulauan Bangka Belitung.
d. Pulau Jawa: DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur.
e. Kepulauan Nusa Tenggara (Sunda Kecil): Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
f. Pulau Kalimantan: Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.
g. Pulau Sulawesi: Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara.
h. Kepulauan Maluku: Maluku dan Maluku Utara.
i. Pulau Papua: Papua dan Papua Barat.

Provinsi terluas adalah provinsi papua dengan ibu kota jayapura dengan luas 319 036,77 dan provinsi dengan luas terkecil adalah DKI Jakarta dengan luas 664,01. Sementara provinsi dengan pulau terbanyak adalah papua barat dengan jumlah 4.514 pulau dan provinsi yang memiliki pulau paling sedikit adalah lampung dengan jumlah 9 pulau.

2. Demografi

Jumlah penduduk indonesia di tahun 2021 adalah 272 682,5 ribu jiwa meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu 270.203,9 ribu berdasarkan provinsi, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah penduduk tertinggi pada tahun 2021 dengan jumlah 48.782,4 jiwa dan provinsi Kalimantan Utara dengan jumlah penduduk 713,6 ribu jiwa sebagai jumlah penduduk terendah, sementara di tahun 2020 di provinsi Jawa Barat masih menjadi provinsi yang memiliki jumlah penduduk tertinggi yaitu 48.274,2 dan di Kalimantan Utara yaitu 701,8 terendah, dan kepadatan penduduk di tahun 2021 sebesasr 142/km2 meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar 141/km2.

B. Gambaran Umum Penelitian

Analisis deskriptif berguna untuk memberikan gambaran suatu data yang bisa dilihat dari nilai *minimum, maksimum, mean,* dan *standar deviation*. Hasil analisis deskriptif bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Ketidakmerataan_Pembangunan_ Antar daerah	102	.038	1.837	.57736	.341058
Ketimpangan_Distribusi_Pendapatan	102	.247	.437	.34753	.038884
Valid N (listwise)	102				

Sumber : Data Sekunder, 2023

Berdasarkan hasil uji deskriptif diatas menyajikan distribusi data ketidakmerataan pembangunan antar daerah (X) dan ketimpangan distribusi pendapatan (Y) pada tahun 2019 sampai 2021. Berdasarkan tabel diatas diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa jumlah data sebanyak 102 data, dari data tersebut bisa dideskripsikan bahwa pada variabel ketidakmerataan pembangunan antar daerah (X) dengan nilai min sebesar 0,038 sedangkan nilai max sebesar 1,837, nilai rata-rata sebesar 0.57736 dan standar deviasi sebesar 0,341058, kemudian pada variabel ketimpangan distribusi pendapatan (Y) dengan nilai min sebesar 0,247 sedangkan nilai mak sebesar 0,437, nilai rata-rata sebesar 0, 34753 dan standar deviasi sebesar 0, 038884.

Kemudian standar deviasi merupakan suatu nilai yang digunakan dalam menetukan persebaran data pada suatu sampel dan melihat seberapa dekat data-data tersebut dengan nilai mean, jika dilihat dari tabel deskriptif diatas nilai standar deviasi dari variabel ketidakmerataan pembangunan antar daerah dan ketimpangan distribusi pendapatan lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai mean.

C. Hasil Analisis Penelitian

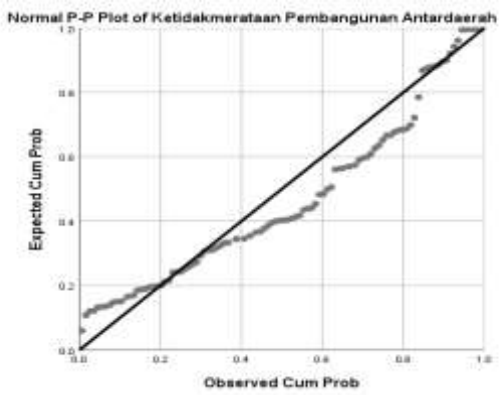
1. Uji Prasyarat Data

   a. Uji Normalitas

      Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang sudah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Hasil uji normalitas data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode uji *Normal Probability Plot* (NPP), bisa dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4.1

Hasil Uji Normalitas Probabiity Plot Ketidakmerataan pembangunan antar daerah

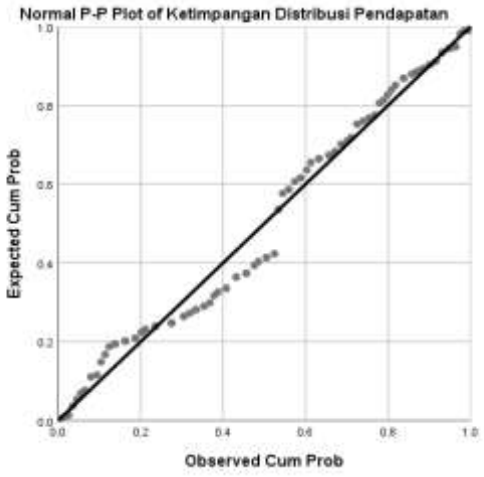


Sumber : Data Sekunder, 2023

Pada gambar diatas diketahui bahwa data dengan *Normal P-P Plot* pada vatiabel ketidakmerataan pembangunan antar daerah yang digunakan dinyatakan berdistribusi normal, dimana dapat diasumsikan data diambil secara acak dari populasi normal. Ini karena titik-titik pada gambar distribusi tampak melebar atau menyatu disekitar diagonal, dan distribusi titik-titik data di sepanjang diagonal memiliki arah yang sama.

Gambar 4.2

Hasil Uji Normalitas Probability Plot Ketimpanga Distribusi Pendapatan



Sumber : Data Sekunder, 2023

Pada gambar diatas diketahui bahwa data dengan *Normal P-P Plot* pada vatiabel ketimpangan distribusi pendapatan yang digunakan dinyatakan berdistribusi normal, dimana dapat diasumsikan data diambil secara acak dari populasi normal. Ini karena titik-titik di gambar distribusi tampak melebar atau

menyatu disekitar diagonal, dan distribusi titik-titik data di sepanjang diagonal memiliki arah yang sama.

b. Uji Homogenitas

Uji homogenitas dilakukan untuk memverifikasi bahwa sampel memiliki varians yang sama. Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji homogenitas varian (uji Levene), sampel memiliki varian yang sama jika nilai sig > 0,05

Tabel 2.2

Hasil Uji Homogenitas

Test of Homogeneity of Variance

		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Ketidakmerataan_Pembangunan_Antar daerah	Based on Mean	1.017	2	201	.363
	Based on Median	.417	2	201	.660
	Based on Median and with adjusted df	.417	2	194.284	.660
	Based on trimmed mean	.738	2	201	.479

Sumber : Data Sekunder, 2023

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa nilai signifikan dari uji homogenitas untuk variabel ketidakmerataan pembangunan antar daerah sebesar 0,363, yang mana hasil ini besar sama dari taraf signifikan 0,05 atau nilai signifikan 0, 363 ≥ 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa uji homogenitas berdistribusi homogen. Hal ini berarti data ketidakmerataan pembangunan antar daerah dan ketimpangan distribusi pendapatan mempunyai tingkat varian yang sama dengan kata lain untuk mengetahui

bahwa himpunan data yang diteliti memiliki himpunan yang sama dilakukan uji homogenitas dilakukan.

c. Uji Linearitas

Uji linearitas digunakan untuk mengetahui apakah dua variabel berhubungan linier atau tidak signifikan. Kriteria uji linieritas adalah dua variabel dikatakan mempunyai hubungan linier jika signifikansinya lebih besar dari 0,05.

Tabel 4.3
Uji Linearitas

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Ketimpangan_Distribusi_Pendapatan * Ketidakmerataan_Pembangunan_Antar daerah	Between Groups	(Combined)	.149	96	.002	2.259	.182
		Linearity	.007	1	.007	10.792	.022
		Deviation from Linearity	.142	95	.001	2.169	.196
	Within Groups		.003	5	.001		
	Total		.153	101			

Sumber : Data Sekunder, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat nilai signifikansi *Deviation from Linearity* antara variabel ketidakmerataan pembangunan antar daerah dan ketimpangan distribusi pendapatan sebesar 0,196 lebih besar dari 0,05 atau 0,196 > 0,05. Berdasarkan hasil uji linearitas ini dapat disimpulkan bahwa variabel ketidakmerataan pembangunan antar daerah memiliki hubungan yang linear dengan variabel ketimpangan

distribusi pendapatan, yang berarti pola hubungan variabel bebas dan variabel terikat akan membentuk satu garis lurus.

2. Uji Hipotesis

a. Regresi Linear Sederhana

Regresi linear sederhana digunakan untuk meramalkan dan memprediksi variabel terikat (Y) apabila variabel bebas (X) diketahui. Hasil data yang diolah dengan spss sebagai berikut:

Tabel 4.4

Uji Regresi Linear Sederhana

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	.333	.007		44.715	.000
	Ketidakmerataan _Pembangunan_ Antar daerah	.025	.011	.221	2.261	.026

a. Dependent Variable: Ketimpangan_Distribusi_Pendapatan

Sumber : Data Sekunder, 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapa diambil persaman model regresi linear sederhana dalam penelitian yaitu:

Y=0, 333 + 0, 0025 X +ei

Dari persamaan model regresi linear sederhana diatas dapat dilihat bahwa:

1) Konstanta sebesar 0. 333 yang artinya apabila variabel ketidakmerataan pembangunan antar daerah (X) adalah

nol, maka variabel ketimpangan distribusi pendapatan (Y) adalah sebesar 0,333 indeks

2) Koefisien regresi ketidakmerataan pembangunan sebesar 0,025 artinya jika ketidakmerataan pembangunan antar daerah mengalami peningkatan satu satuan maka ketimpangan disttibusi pendapatan meningkat sebesar 0,025 indeks

b. Uji t

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas yaitu ketidakmerataan pembangunan antardarah memiliki pengaruh parsial dan signifikan terhadap variabel terikat yaitu ketimpangan distribusi. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel:

Tabel 4.5

Uji t

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	.333	.007		44.715	.000
	Ketidakmerataan_Pembangunan_Antardaerah	.025	.011	.221	2.261	.026

a. Dependent Variable: Ketimpangan_Distribusi_Pendapatan

Sumber : Data Sekunder, 2023

Berdasarkan tabel di atas dilihat niai signifikansi variabel bebas yaitu ketidakmeratan pembangunan antar daerah sebesar

2,261 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,026. Hasil signifikan 0,026 < 0,05 artinya secara parsial variabel ketidakmeratan pembangunan antar daerah berpengaruh pada alpha 5% atau confidence interval 95% terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Maka keputusan yang di ambil Ho ditolak dan Ha diterima yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan ketidakmeratan pembangunan antar daerah terhadap ketimpangan distribusi pendapatan 34 provinsi di Indonesia.

c. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi mengukur keakuratan regresi linier sederhana yang dapat dijelaskan dengan persentase kontribusi variabel independen terhadap perubahan nilai variabel dependen. Nilai R^2 dianggap baik jika lebih besar dari 0,05.

Dari hasil penelitian pada uji hipotesis variabel ketidakmerataan pembangunan antar daerah memiliki pengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, maka perlu dihitung uji koefisien determinasi untuk membuktikan ada atau tidaknya pengaruh ketidakmerataan pembangunan antar daerah terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

Tabel 4.6

Uji Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.221[a]	.049	.039	.038116	1.527

a. Predictors: (Constant), Ketidakmerataan_Pembangunan_Antar daerah

b. Dependent Variable: Ketimpangan_Distribusi_Pendapatan

Sumber : Data Sekunder, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai R Square adalah 0,049 atau 4,9%. Hasil uji R Square ini menyatakan kemampuan variabel ketidakmerataan pembangunan antar daerah menjelaskan naik turunnya ketimpangan distribusi pendapatan sebesar 4,9%. Dengan kata lain sisanya sebebsar 95,1 % dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diantaranya pertumbuhan penduduk yang pesat menyebabkan pendapatan per kapita mengalami penurunan, peningkatan inflasi yang tidak diikuti sebanding dengan penambahan produksi barang-barang, proyek-proyek padat modal yang sangat banyak diinvestasikan, rendahnya mobilitas sosial, melindungi usaha-usaha golongan kapitalis menggunakan kebijakan industri subsitusi impor yang dilaksanakan sehinggaharga barang-barang hasil industri meningkat, tidak elestisnya permintaan bagi barang-barang ekspor negara-negara sedang berkembang yang disebabkan oleh nilai tukar

perdagangan yang memburuk bagi negara sedang berkembang dalam perdagangan daerah negara-negara maju, industri-industri kerajinan masyarakat yang hancur.[70]

D. Pembahasan

Berdasarkan hasil pengolahan yang dilalukan menunjukkan variabel bebas yaitu ketidakmerataan pembangunan antar daerah berpengaruh pada alpha 5% atau confidence interval 95% terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Maka keputusan yang diambil ialah Ha diterima dan Ho ditolak yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara ketidakmerataan pembangunan antar daerah terhadap ketimpangan distribusi pendapatan 34 provinsi di Indonesia.

Penelitian ini sejalan dengan teori yang disampaikan oleh Adelman dan Moris yang mengemukakan bahwa ketidakmerataan pembangunan antar daerah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di negara sedang berkembang.[71] Akibat pembangunan yang tidak merata tersebut, terdapat perbedaan tingkat kemakmuran antar daerah, yang pada akhirnya menimbulkan masalah sosial politik, misalnya antara kota dan desa, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Keberadaan tipologi yang berbeda ini jelas anti-pembangunan dan oleh karena itu konsekuensinya dapat berupa jurang yang mencolok antara yang

[70] Udin Saripudin. *Rancang Bangun…* Hal 94
[71] Udin Saripudin. *Rancang Bangun…* Hal 94.

kaya dan yang miskin, dengan jurang yang melebar dari waktu ke waktu dan distribusi pendapatan menjadi tidak merata.[72]

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian Sanjay Kumar Rout & Rajeswari Behera (2022). *Income Inequality and its Important Determinants in India* yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi memperburuk ketimpangann pendapatan disebabkan kerena kue pembangunan ekonomi tidak terdistribusi secara merata di antara seluruh lapisan masyarakat.[73]

[72]Muhammad Hasan dan Muhammad Azis.*Pembangunan Ekonomi*... Hal 69.;
[73] Sanjay Kumar Rout & Rajeswari Behera. *Income Inequality*... Hal. 171-187.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil pengolahan yang dilakukan dengan spss uji t menunjukkan variabel bebas berpengaruh pada alpha 5% atau confidence interval 95% terhadap variabel terikat artinya Ha diterima dan Ho ditolak secara parsial variabel ketidakmerataan pembangunan antar daerah memiliki pengaruh terhadap variabel ketimpangan distribusi pendapatan. pembangunan ekonomi memperburuk ketimpangann pendapatan disebabkan kerena kue pembangunan ekonomi tidak terdistribusi secara merata di antara seluruh lapisan masyarakat.
2. Kemampuan variabel ketidakmerataan pembangunan antar daerah menjelaskan naik turunnya ketimpangan distribusi pendapatan sebesar 4,9%. Dengan kata lain sisanya sebesar 95,1% dipengaruhi oleh variabel lain yaitu: pertumbuhan penduduk yang pesat menyebabkan pendapatan per kapita mengalami penurunan, peningkatan inflasi yang tidak diikuti sebanding dengan penambahan produksi barang-barang, proyek-proyek padat modal yang sangat banyak diinvestasikan, rendahnya mobilitas sosial, melindungi usaha-usaha golongan kapitalis menggunakan kebijakan industri subsitusi impor yang dilaksanakan sehinggaharga barang-barang hasil industri meningkat, tidak elestisnya permintaan bagi barang-barang ekspor negara-negara

sedang berkembang yang disebabkan oleh nilai tukar perdagangan yang memburuk bagi negara sedang berkembang dalam perdagangan daerah negara-negara maju, industri-industri kerajinan masyarakat yang hancur

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan maka hal-hal yang dapat dilakukan:

1. Berdasarkan hasil penelitian Uji t yang dilakukan diketahui bahwasanya ketidakmerataan pembangunan antar daerah memiliki pengaruh dalam menjelaskan naik turunnya ketimpangan distribusi pendapatan 34 provinsi di Indonesia maka dalam hal ini pemerintah perlu untuk lebih memperhatikan solusi terhadap terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan yang diakibatkan oleh ketidakmeratan pembangunan antar daerah yang meningkat sehingga diperlukannya kebijakan yang saling melengkapi satu sama lain.
2. Koefisien determinasi memperoleh nilai sebesar sebesar 4,9% hal ini tergolong rendah namun pemerintah perlu mengatasi tingginya ketidakmerataan pembangunan antar daerah pada suatu daerah sehingga ketimpangan distribusi pendapatan dapat berkurang, selain itu ada variabel lain yang lebih mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan yang juga harus diperhatikan oleh pemerintah agar tingkat ketimpangan distribusi pendapatan tindak semakin tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Anwar, Syaiful. 2022. Pengantar Pembangunan Ekonomi. Cirebon: Green Publisher Indonesia.

Arsyad, L. 2014. *Ekonomi Pembangunan Lanjutan*. Jakarta: Universitas Terbuka

Adesy, Fordebi. 2016. *Ekonomi Dan Bisnis Islam; Seri Konsep Dan Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.

Az-Zuhali, Wahbah. 2013. *Tafsir Al-Wasith Jilid 3*. Jakarta : Gema Insani.

Asy-Syaukani, Imam. Tafsir Fathul Qadir".

Beik, Irfan Syauki. 2019. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Depok: Rajagrafindo.

Farrah, Najwa, Imamudin Yuliadi. 2020. *Determinan Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia*. Proceedings The 1st UMYGrace

Hasan, Muhammad dan Muhammad Azis. 2019. *Pembangunan Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat Strategi Pembangunan Manusia Dalam Perspektif Ekonomi Lokal*". Pustaka taman ilmu: Makassar.

Huda, Nurul. 2017 "*Ekonomi Pembangunan Islam*". Jakarta: Kencana.

Idri. 2015. *Hadis Ekonomi Dalam Persepektif Hadis Nabi.* Jakarta: Kencana.

Mahri, Jajang W. 2021. Ekonomi Pembangunan Islam. Jakarta: Depertemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah.

Nawawi, Muhyiddin Yahya Bin Syaraf. 2007. *Hadits Arba'in Nawawiyah*. 2007.

Ns. Hidayati, dkk. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Sukaharjo: Pradina pustaka

Nuryadi, dkk. 2017. *Dasar-dasar Statistik Peneltian*. Yogyakarta: Sibuku Media.

Permana, Meiki. 2021. *Degradasi Lingkungan: Pendekatan Kajian Lingkungan Yang Berkelanjut*. CV Nas Media Pustaka:Yogyakarta..

Purba, Bonaraja Dkk. 2021 *Ekonomi Pembangunan*. Medan: Yayasan Kita Menulis.

Purnomo, Rochmat Aldy 2016. *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis Dengan SPSS*. Ponorogo: UNMUH Ponorogo Press.

Saripudin, Udin. 2021. *Rancang Bangun Model Pemberdayaan Ekonomi Petani Berbasis Ziswaf*. Bandung:Whidina Bhakti Persada Bandung.

Sjafrizal. 2017. *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*, Jakarta: Rajawali Press.

Sriyana. 2021. *Kemiskinan, Pemberdayaan, dan Kesejahteraan Sosial.* : Malang

Supranto. J. 2016. *Statistik Teori dan Aplikasi* . Jakarta : Penerbit Erlangga.

Tambunan, Tulus T.H. 2018. *Perekonomian Indonesia*. Bogor:Ghalia Indonesia.

Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif*,

Jurnal:

Cendanawangi, Eunike. 2020. *Pengaruh Remitansi, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Periode 1987-2017*. CALYPTRA Vol.8 (2) Mei.

Dewantara, Aditama. 2020 *Etika Distribusi Ekonomi Islam:Perbandingan Sistem Distribusi Kapitalis Dengan Sistem Distribusi Islam*. Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam vol 4 no 1.

Hamrullah, Kurniati Mansyur. Nursini. 2021. "*Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan*." *Development Policy and Management Review* 1 (2):

Ilahi, Restu Prana, dkk. 2021. *Hubungan Agama Islam dan Pembangunan Ekonomi dalam Kemajuan Negara: Sebuah Tinjauan Umum*. Muảṣarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer Vol. 3 No. 2

Jacob Makapedua. Dkk. 2023. *Distribusi Pendapatan Dan Kemiskinan(Beberapa Kajian Kebijakan)*. AKULTURASI: jurnal ilmiah agrobisnis perikanan. Vol. 11 No. 1.

Noviar. 2021. *Analisis Ketimpangan Dan Klasifikasi Pembangunan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten Tahun 2016-2020*. Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, Vol.5, No.1, Juni.

Pamiati, Bustam Anggun Nenik Woyant. 2021. *Analisis pengaruh populasi, pertumbuhan ekonomi, tpak dan ipm terhadap ketimpangan pembangunan di kawasan barlingmascakeb 2013-2019*. BISECER (Business Economic Entrepreneursh ip) Vol. 4 No. 1.

Rahayu. Sri Endang. 2021. *Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Indonesia*. SinteSa Vol. 1 No. 1

Ramadhan, Yery Arif , Setyo Wahyu Sulistyono. 2021 *Determinan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Karesidenan Malang Tahun 2015-2019*. Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE) Vol. 5, No. 4,

Sanjay Kumar Rout, Rajeswari Behera. 2022. "Income Inequality and Its Important Determinants in India." *Saudi Journal of Economics and Finance* 94.14

Safitri, Erni dkk. 2021. *Analisis Disparitas Pembangunan Antar Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jambi(Segi Ekonomi Dam Non Eknomi).* Jurnal Paradigma Ekonomika Vol 16, No 1,

Sholikah, Neva Rodiyatul dan Niniek Imaningsih. 2022. *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2021*. Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE) Vol. 10 No. 3.

Sulistyaningrum, dkk. 2020. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Provinsi-Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2011-2020*. Sinomika Journal Vol 1 No.4.

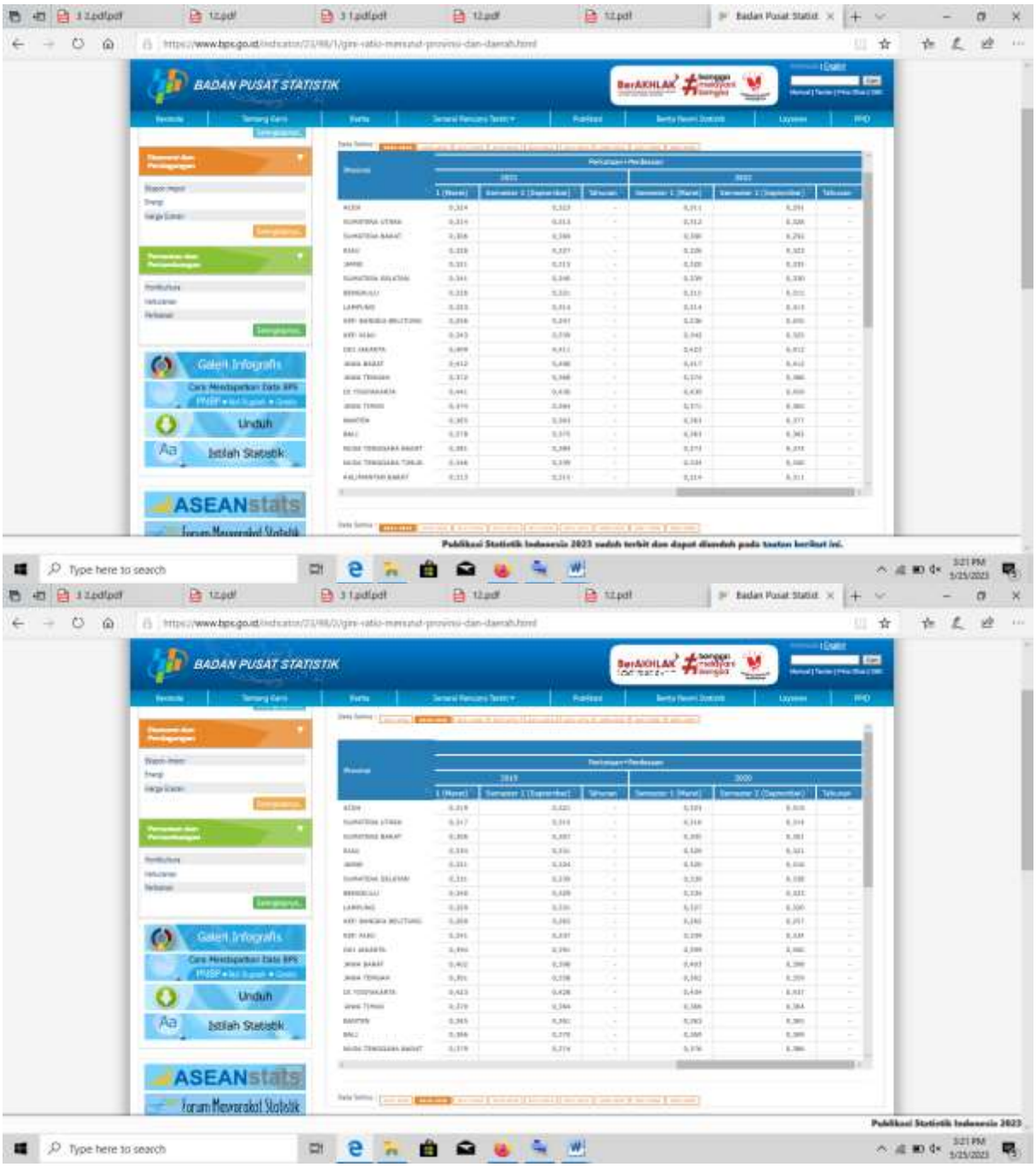
Prosiding:

Nadia, Alfi Dkk. 2021. *Analisis Ketimpangan dalam Pembangunan Ekonomi Antarkota di Provinsi Aceh Tahun 2008-2017*. *Prosiding SEMDI-UNAYA, 4*(1).

LAMPIRAN 1

TABULASI DATA MENTAH

Indeks Gini



PROVINSI ACEH

PDRB Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Kabupaten/Kota (Miliar Rupiah), 2017-2021
GRDP of Aceh Province at Current Market Prices
by Regency/Municipality (Billion Rupiahs), 2017-2021

KABUPATEN/KOTA *Regency/Municipality*	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Kab. Simeulue	1.468	1.530	1.601	1.602	1.648
02. Kab. Aceh Singkil	1.601	1.665	1.731	1.714	1.780
03. Kab. Aceh Selatan	3.887	4.063	4.243	4.241	4.346
04. Kab. Aceh Tenggara	3.198	3.302	3.442	3.436	3.487
05. Kab. Aceh Timur	7.488	7.802	8.147	8.273	8.434
06. Kab. Aceh Tengah	5.410	5.639	5.837	5.768	5.953
07. Kab. Aceh Barat	6.013	6.623	6.953	7.084	7.486
08. Kab. Aceh Besar	9.213	9.562	9.978	10.017	10.262
09. Kab. Pidie	7.153	7.450	7.780	7.771	7.975
10. Kab. Bireun	9.198	9.586	10.065	9.963	10.374
11. Kab. Aceh Utara	15.545	16.286	16.853	17.017	16.924
12. Kab. Aceh Barat Daya	2.741	2.867	3.003	2.984	3.070
13. Kab. Gayo Lues	1.872	1.896	1.920	1.937	1.982
14. Kab. Aceh Tamiang	5.491	5.724	5.984	6.009	6.063
15. Kab. Nagan Raya	5.865	6.116	6.530	6.750	7.110
16. Kab. Aceh Jaya	1.848	1.923	1.995	1.982	2.034
17. Kab. Bener Meriah	3.338	3.477	3.627	3.630	3.744
18. Kab. Pidie Jaya	2.391	2.502	2.604	2.583	2.636
71. Kota Banda Aceh	13.937	14.557	15.158	14.644	15.454
72. Kota Sabang	1.015	1.075	1.138	1.123	1.153
73. Kota Langsa	3.541	3.694	3.856	3.813	3.975
74. Kota Lhokseumawe	6.592	6.841	7.113	6.985	7.253
75. Kota Subulussalam	1.246	1.301	1.359	1.385	1.439
Jml Kab./Kota *Total of Reg./Mun.*	**120.051**	**125.482**	**130.917**	**130.712**	**134.581**
Provinsi/Province	**121.241**	**126.824**	**132.070**	**131.581**	**135.250**

Catatan/*Note*:

* Angka sementara/Preliminary figures

** Angka sangat sementara/*Very preliminary figures*

https://www.bps.go.id

Tabel 13.1 / ***Table***

Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2017 - 2021
Population by Regency/City in Aceh Province, 2017 - 2021

Kabupaten/Kota *Regency/City*	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten/*Regency*					
Simeulue	91 372	92 393	93 228	92 865	96 421
Aceh Singkil	119 490	121 681	124 101	126 514	125 569
Aceh Selatan	231 893	235 115	238 081	232 414	245 361
Aceh Tenggara	208 481	212 417	216 495	220 860	219 278
Aceh Timur	419 594	427 567	436 081	422 401	442 226
Aceh Tengah	204 273	208 505	212 494	215 576	215 084
Aceh Barat	201 682	205 971	210 113	198 736	212 403
Aceh Besar	409 109	417 302	425 216	405 535	430 337
Pidie	432 599	439 131	444 976	435 275	453 121
Bireuen	453 224	461 726	471 635	436 418	477 142
Aceh Utara	602 554	611 435	619 407	602 793	629 741
Aceh Barat Daya	145 726	148 111	150 393	150 775	153 900
Gayo Lues	91 024	92 602	94 100	99 532	95 040
Aceh Tamiang	287 007	291 112	295 011	294 356	300 848
Nagan Raya	161 329	164 483	167 294	168 392	168 928
Aceh Jaya	89 618	91 087	92 892	93 159	95 861
Bener Meriah	142 526	145 086	148 175	161 342	150 266

Kabupaten/Kota *Regency/City*	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kota/*City*					
Banda Aceh	259 913	265 111	270 321	252 899	276 223
Sabang	33 978	34 571	34 874	41 197	34 836
Langsa	171 574	174 318	176 811	185 971	181 033
Lhokseumawe	198 980	203 284	207 202	188 713	210 177
Subulussalam	78 725	80 215	81 417	90 751	82 186
Aceh	**5 189 466 5**	**5 281 314**	**5 371 532**	**5 274 871**	**5 459 114**

PDRB Provinsi Sumatera Utara Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Kabupaten/Kota (Miliar Rupiah), 2017-2021
GRDP of Sumatera Utara Province at 2010 Constant Market Prices
by Regency/Municipality (Billion Rupiahs), 2017-2021

KABUPATEN/KOTA *Regency/Municipality*	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Kab. Nias	2.325	2.440	2.563	2.609	2.667
02. Kab. Mandailing Natal	8.416	8.904	9.376	9.289	9.586
03. Kab. Tapanuli Selatan	8.748	9.202	9.684	9.722	10.037
04. Kab. Tapanuli Tengah	6.348	6.678	7.024	6.971	7.149
05. Kab. Tapanuli Utara	5.281	5.510	5.765	5.851	6.058
06. Kab. Toba Samosir	5.001	5.249	5.504	5.489	5.649
07. Kab. Labuhan Batu	21.048	22.112	23.233	23.253	24.148
08. Kab. Asahan	23.525	24.845	26.245	26.300	27.280
09. Kab. Simalungun	24.716	25.996	27.349	27.626	28.649
10. Kab. Dairi	5.969	6.268	6.570	6.508	6.642
11. Kab. Karo	13.146	13.744	14.376	14.261	14.582
12. Kab. Deli Serdang	64.992	68.341	71.879	70.597	72.174
13. Kab. Langkat	26.823	28.170	29.598	29.343	30.247
14. Kab. Nias Selatan	3.827	4.019	4.221	4.247	4.333
15. Kab. Humbang Hasundutan	3.757	3.946	4.141	4.136	4.219
16. Kab. Pakpak Bharat	761	805	852	851	872
17. Kab. Samosir	2.777	2.932	3.099	3.080	3.162
18. Kab. Serdang Bedagai	17.516	18.421	19.393	19.308	19.863
19. Kab. Batu Bara	22.034	22.999	23.999	23.924	24.486
20. Kab. Padang Lawas Utara	7.379	7.791	8.228	8.323	8.594
21. Kab. Padang Lawas	7.110	7.534	7.959	8.053	8.362
22. Kab. Labuhan Batu Selatan	16.908	17.798	18.750	18.899	19.620
23. Kab. Labuhan Batu Utara	15.602	16.413	17.259	17.307	17.969
24. Kab. Nias Utara	2.134	2.229	2.332	2.369	2.417
25. Kab. Nias Barat	1.126	1.180	1.237	1.257	1.286
71. Kota Sibolga	3.225	3.394	3.570	3.522	3.596
72. Kota Tanjung Balai	5.175	5.474	5.790	5.763	5.899
73. Kota Pematang Siantar	8.750	9.170	9.612	9.430	9.548
74. Kota Tebing Tinggi	3.576	3.761	3.954	3.926	4.025
75. Kota Medan	139.739	148.007	156.781	153.670	157.689
76. Kota Binjai	7.310	7.709	8.134	7.984	8.163
77. Kota Padang Sidempuan	3.830	4.039	4.261	4.230	4.347
78. Kota Gunungsitoli	3.049	3.233	3.428	3.442	3.519
Jml Kab./Kota *Total of Reg./Mun.*	**491.923**	**518.313**	**546.167**	**541.540**	**556.836**
Provinsi/Province	**487.531**	**512.763**	**539.514**	**533.746**	**547.652**

Catatan/*Note:*

* Angka sementara/Preliminary figures

https://www.bps.go.id

Tabel 13.1 / ***Table***

Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara (ribu), 2017–2021

Population by Regency/Municipality in Sumatera Utara Province (thousand), 2017–2021

Kabupaten/Kota *Regency/Municipality*	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01 Nias	**142 110**	**142 840**	**143 319**	**146 672**	**147 794**
02 Mandailing Natal	439 505	443 490	447 287	472 886	478 062
03 Tapanuli Selatan	278 587	280 283	281 931	300 911	303 685
04 Tapanuli Tengah	363 705	370 171	376 667	365 177	369 300
05 Tapanuli Utara	297 806	299 881	301 789	312 758	315 222
06 Toba Samosir	181 790	182 673	183 712	206 199	208 754
07 Labuhanbatu	478 593	486 480	494 178	493 899	499 982
08 Asahan	718 718	724 379	729 795	769 960	777 626
09 Simalungun	859 228	863 693	867 922	990 246	1 003 727
10 Dairi	281 876	283 203	284 304	308 764	311 665
11 Karo	403 207	409 675	415 878	404 998	409 877
12 Deli Serdang	2 114 627	2 155 625	2 195 709	1 931 441	1 941 374
13 Langkat	1 028 309	1 035 411	1 041 775	1 030 202	1 034 519
14 Nias Selatan	314 395	317 207	319 902	360 531	366 163
15 Humbang Hasundutan	186 694	188 480	190 186	197 751	199 719
16 Pakpak Bharat	47 183	48 119	48 935	52 351	53 315
17 Samosir	125 099	125 816	126 188	136 441	137 696
18 Serdang Bedagai	612 924	614 618	616 396	657 490	662 076
19 Batu Bara	409 091	412 992	416 493	410 678	413 171
20 Padang Lawas Utara	262 895	267 771	272 713	260 720	263 551
21 Padang Lawas	269 799	275 515	281 239	261 011	263 719
22 Labuhanbatu Selatan	326 825	332 922	338 982	314 094	316 798
23 Labuhanbatu Utara	357 691	360 926	363 816	381 994	385 869
24 Nias Utara	136 090	137 002	137 967	147 274	148 790
25 Nias Barat	81 279	81 663	82 154	89 994	90 585
71 Sibolga	87 090	87 317	87 626	89 584	89 932
72 Tanjungbalai	171 187	173 302	175 223	176 027	177 640
73 Pematangsiantar	251 513	253 500	255 317	268 254	270 768
74 Tebing Tinggi	160 686	162 581	164 402	172 838	174 969
75 Medan	2 247 425	2 264 145	2 279 894	2 435 252	2 460 858
76 Binjai	270 926	273 892	276 597	291 842	295 361
77 Padangsidimpuan	216 013	218 892	221 827	225 105	227 674
78 Gunungsitoli	139 281	140 927	142 426	136 017	136 707
Sumatera Utara	**14 262 147**	**14 415 391**	**14 562 549**	**14 799 361**	**14 936 148**

Sumber/ Source : BPS Provinsi Sumatera Utara/ *BPS-Statistics of Sumatera Utara Province*

https://niaskab.bps.go.id

PROVINSI SUMATERA BARAT

Tabel/*Table* 37.
PDRB Provinsi Sumatera Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Kabupaten/Kota (Miliar Rupiah), 2017-2021
GRDP of Sumatera Barat Province at 2010 Constant Market Prices
by Regency/Municipality (Billion Rupiahs), 2017-2021

KABUPATEN/KOTA *Regency/Municipality*	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Kab. Kepulauan Mentawai	2.742	2.876	3.012	2.956	3.042
02. Kab. Pesisir Selatan	8.678	9.140	9.577	9.471	9.790
03. Kab. Solok	8.965	9.430	9.906	9.795	10.120
04. Kab. Sijunjung	6.136	6.447	6.757	6.683	6.893
05. Kab. Tanah Datar	8.782	9.225	9.684	9.576	9.891
06. Kab. Padang Pariaman	12.350	13.022	13.335	11.939	12.200
07. Kab. Agam	13.249	13.943	14.609	14.407	14.940
08. Kab. Lima Puluh Kota	10.124	10.653	11.192	11.062	11.431
09. Kab. Pasaman	5.614	5.893	6.176	6.123	6.330
10. Kab. Solok Selatan	3.613	3.793	3.977	3.928	4.060
11. Kab. Dharmasraya	6.843	7.204	7.560	7.455	7.710
12. Kab. Pasaman Barat	10.384	10.926	11.412	11.259	11.682
71. Kota Padang	39.676	42.082	44.457	43.632	45.228
72. Kota Solok	2.581	2.727	2.876	2.836	2.937
73. Kota Sawah Lunto	2.517	2.656	2.797	2.761	2.830
74. Kota Padang Panjang	2.313	2.445	2.581	2.543	2.632
75. Kota Bukittinggi	5.483	5.812	6.152	6.045	6.263
76. Kota Payakumbuh	3.998	4.239	4.488	4.414	4.572
77. Kota Pariaman	3.234	3.411	3.592	3.545	3.670
Jml Kab./Kota *Total of Reg./Mun.*	**157.282**	**165.923**	**174.140**	**170.430**	**176.218**
Provinsi/*Province*	**155.984**	**163.996**	**172.206**	**169.417**	**174.996**

Catatan/*Note:*

* Angka sementara/Preliminary figures

** Angka sangat sementara/Very *preliminary figures*

https://www.bps.go.id

Tabel 13.1 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat (Ribu Jiwa), 2017-2021
Table ***Population by Regency/Municipality in West Sumatera Province (Thousand People), 2017-2021***

Kabupaten/Kota *Regency/Municipality*	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten/*Regency*					
1. Kep. Mentawai	88,69	90,37	92,02	87,62	88,38
2. Pesisir Selatan	457,29	460,72	463,92	504,42	509,61
3. Solok	368,69	371,11	373,41	391,50	394,23
4. Sijunjung	230,10	233,81	237,38	235,05	237,31
5. Tanah Datar	346,58	347,41	348,22	371,70	373,69
6. Padang Pariaman	411,00	413,27	415,61	430,63	433,01
7. Agam	484,29	487,91	491,28	529,14	534,20
8. Lima Puluh Kota	376,07	379,51	382,82	383,53	385,63
9. Pasaman	275,73	278,48	281,21	299,85	303,10
10. Solok Selatan	165,60	168,41	171,08	182,03	184,85
11. Dhamasraya	235,48	241,57	247,58	228,59	231,21
12. Pasaman Barat	427,30	435,61	443,72	431,67	436,31
Kota/*Municipality*					
13. Padang	927,01	939,11	950,87	909,04	913,45
14. Solok	68,60	69,78	71,01	73,44	74,47
15. Sawahlunto	61,40	61,90	62,52	65,14	65,69
16. Padang Panjang	52,42	52,99	53,69	56,31	56,97
17. Bukittinggi	126,80	128,78	130,77	121,03	121,59
18. Payakumbuh	131,82	133,70	135,57	139,58	141,184
19. Pariaman	86,62	87,63	88,50	94,22	95,29
Sumatera Barat	**5321,49**	**5382,08**	**5441,20**	**5 534,47**	**5 580,23**

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat
Source : *BPS-Statistic of West Sumatera Province*

LAMPIRAN 2

JADWAL PENELITIAN

Pengaruh Ketidakmerataan

Pembangunan Antar daerah Terhadap Ketimpangan Distribusi

Pendapatan34 Provinsi Di Indonesia Periode Tahun 2019-2021

no	Kegiatan	Sep 2022				Okt 2022				Nov 2022				Des 2022				Jan 2023				Feb 2023				Mar 2023				Apr 2023				Mai 2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Bimbingan Judul Skripsi ke PA		■	■	■																																
2	Pengajuan Skripsi ke					■	■																														
3	Pengeluaran SK Pembimbing							■																														
4	Bimbingan BAB I-BAB III								■	■	■	■	■	■	■	■	■																					
5	Revisi																			■																		
6	Bimbingan BAB IV -BAB V dan abstrak																					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
7	acc Munaqashah																																		■		

TABULASI DATA

NO	Tahun	X	Y
1	2019	0.384	0.321
2		0.576	0.315
3		0.267	0.307
4		0.33	0.331
5		0.455	0.324
6		0.841	0.339
7		0.718	0.329
8		0.214	0.331
9		0.402	0.262
10		0.264	0.337
11		0.52	0.391
12		0.691	0.398
13		0.631	0.358
14		0.472	0.428
15		0.971	0.364
16		0.627	0.361
17		0.953	0.37
18		0.269	0.374
19		0.189	0.355
20		0.435	0.318
21		0.48	0.335
22		0.147	0.334
23		0.5	0.335
24		1.001	0.292
25		0.625	0.376
26		0.342	0.33
27		0.443	0.391
28		0.57	0.393
29		0.666	0.41
30		0.531	0.365
31		0.243	0.32
32		0.281	0.31
33		1.464	0.381
34		1.176	0.391
35	2020	0.401	0.319
36		0.557	0.314
37		0.302	0.301
38		0.796	0.321
39		0.408	0.316
40		0.749	0.338
41		0.735	0.323
42		0.2	0.32
43		0.422	0.257
44		0.238	0.334

45		0.492	0.4
46		0.728	0.398
47		0.657	0.359
48		0.515	0.437
49		0.975	0.364
50		0.631	0.365
51		0.365	0.369
52		0.276	0.386
53		0.216	0.356
54		0.434	0.325
55		0.463	0.32
56		0.171	0.351
57		0.486	0.335
58		1.11	0.3
59		0.772	0.368
60		0.331	0.321
61		0.488	0.382
62		0.719	0.388
63		0.635	0.406
64		0.191	0.356
65		0.434	0.326
66		0.357	0.29
67		1.491	0.376
68		1.486	0.395
69	2021	0.415	0.323
70		0.556	0.313
71		1.008	0.3
72		0.418	0.327
73		0.398	0.315
74		1.053	0.34
75		0.738	0.321
76		0.038	0.314
77		0.424	0.247
78		0.238	0.339
79		0.484	0.411
80		0.733	0.406
81		0.654	0.368
82		0.518	0.436
83		0.982	0.364
84		0.964	0.363
85		0.35	0.375
86		0.279	0.384
87		0.218	0.339
88		0.434	0.315
89		0.453	0.32
90		0.169	0.325

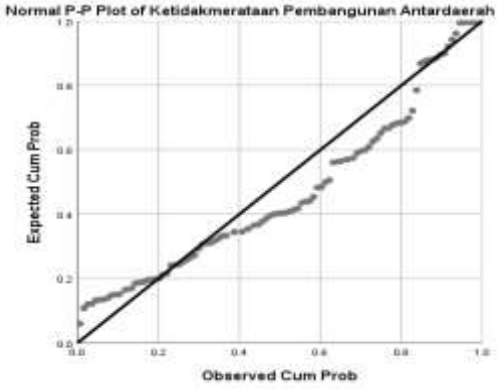
91		0.496	0.331
92		1.522	0.285
93		0.681	0.359
94		0.333	0.326
95		0.487	0.377
96		0.705	0.394
97		0.623	0.409
98		0.194	0.366
99		0.443	0.316
100		0.69	0.278
101		1.447	0.374
102		1.837	0.396

OUTPUT DATA

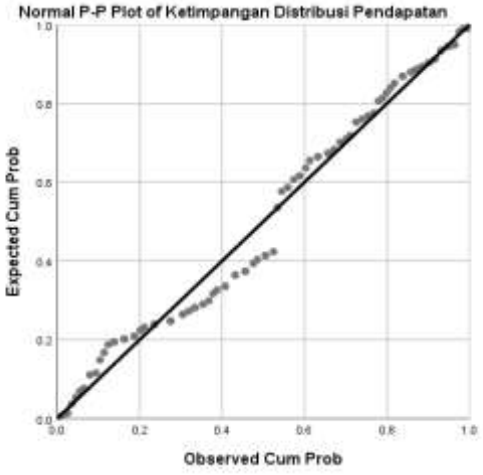
Tabel 4.1
Analisis Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Ketidakmerataan_Pembangunan_Antar daerah	102	.038	1.837	.57736	.341058
Ketimpangan_Distribusi_Pendapatan	102	.247	.437	.34753	.038884
Valid N (listwise)	102				

Gambar 4.1
Hasil Uji Normalitas Probabiity Plot Ketidakmerataan pembangunan antar daerah



Gambar 4.2
Hasil Uji Normalitas Probability Plot Ketimpanga Distribusi Pendapatan



Tabel 4.2
Hasil Uji Homogenitas
Test of Homogeneity of Variance

		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Ketidakmerataan_Pembangunan_Antar daerah	Based on Mean	1.017	2	201	.363
	Based on Median	.417	2	201	.660
	Based on Median and with adjusted df	.417	2	194.284	.660
	Based on trimmed mean	.738	2	201	.479

Tabel 4.3
Uji Linearitas

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Ketimpangan_Distribusi_Pendapatan * Ketidakmerataan_Pembangunan_Antar daerah	Between Groups	(Combined)	.149	96	.002	2.259	.182
		Linearity	.007	1	.007	10.792	.022
		Deviation from Linearity	.142	95	.001	2.169	.196
	Within Groups		.003	5	.001		
	Total		.153	101			

Tabel 4.4
Uji Regresi Linear Sederhana

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	.333	.007		44.715	.000
	Ketidakmerataan_Pembangunan_Antar daerah	.025	.011	.221	2.261	.026

a. Dependent Variable: Ketimpangan_Distribusi_Pendapatan

Tabel 4.5
Uji t

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	.333	.007		44.715	.000
	Ketidakmerataan_Pembangunan_Antar daerah	.025	.011	.221	2.261	.026

a. Dependent Variable: Ketimpangan_Distribusi_Pendapatan

BIODATA DIRI



Nama Lengkap : Helma

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat, Tanggal Lahir : Bukittinggi, 24 Oktober 2001

Alamat : Pahambatan Balingka Kec IV Koto Kab Agam

No Handphone : 082384641908

Moto Hidup : Man Jadda Wajada

Pendidikan Terakhir

1. 2007-2009 : MI SIKAKAP TIMUR
2. 2009-2013 : SD N 11 PAHAMBATAN
3. 2013-2016 : MTSN BALINGKA
4. 2016-2019 : MA TAMAN RAYA BALINGKA
5. 2019-Sekarang : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SMDD BUKITTINGGI

Pengalaman Organisasi

1. Anggota ORBIT tahun 2019